

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Objek Penelitian

4.1.1 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi DKI Jakarta

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi DKI Jakarta adalah unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah provinsi DKI Jakarta. Lokasi Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta terletak di Lantai 15 Gedung Pemprov DKI Jakarta, yang beralamat di Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9, Jakarta Pusat. Secara struktural, Bakesbangpol dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Badan Kesbangpol dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan. Kedudukan konstitusional Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 98 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta memiliki visi yakni terwujudnya masyarakat yang berideologi Pancasila, berwawasan kebangsaan, demokratis, berketahanan ekonomi, sosial dan budaya. Adapun misi yang diusung terdiri dari beberapa poin:

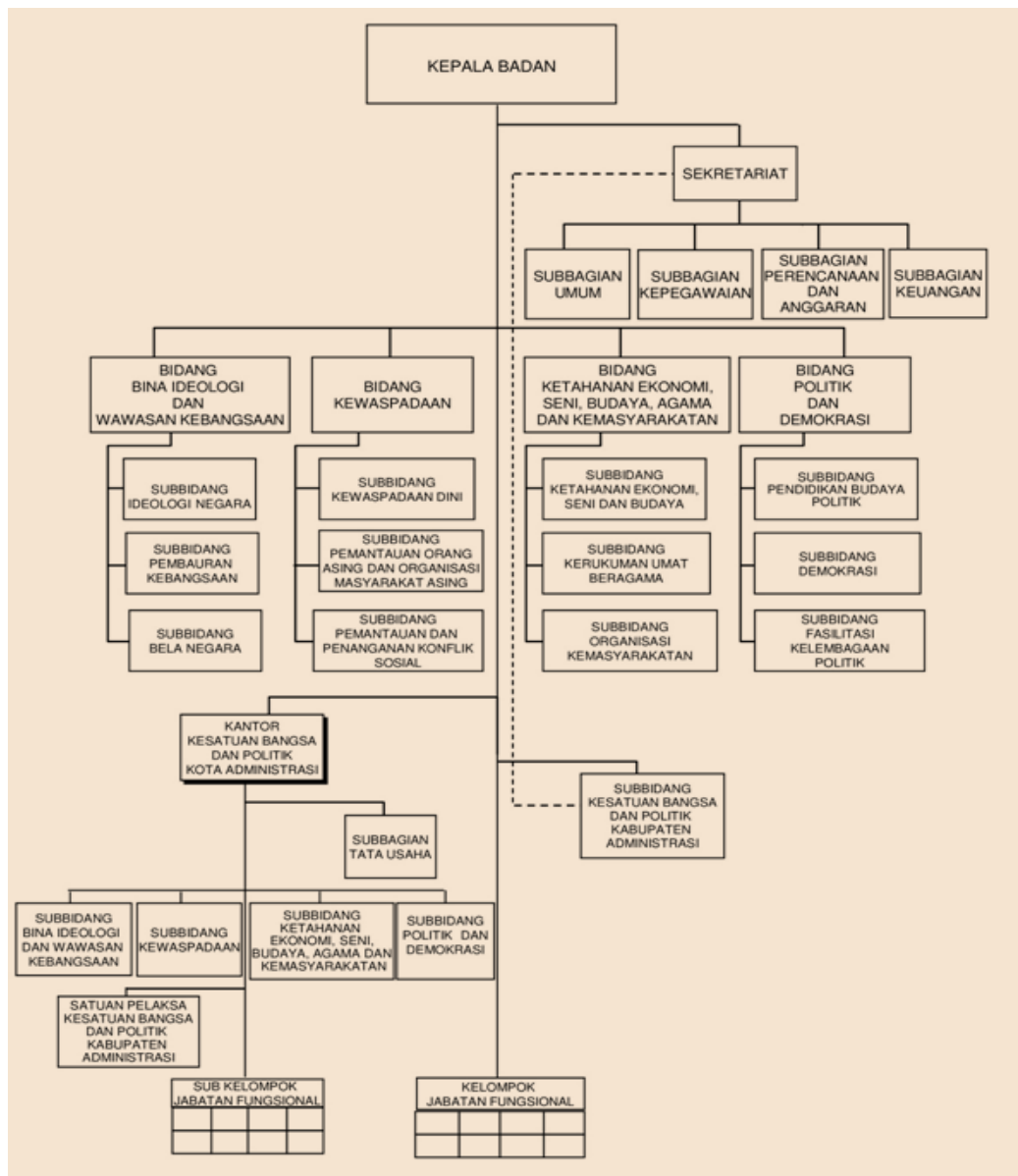
1. Meningkatkan pemahaman ideologi pancasila, wawasan kebangsaan, kesadaran bela negara dan pembauran

kebangsaan untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Meningkatkan ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama, dan organisasi kemasyarakatan yang sejahtera dengan menjunjung nilai-nilai kebhinnekaan, toleransi dalam memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Meningkatkan pemahaman budaya politik yang demokratis dan membangun kemitraan kelembagaan politik yang harmonis.
4. Meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan serta penanganan konflik yang memberikan dampak terhadap persatuan dan kesatuan bangsa.
5. Memelihara sinergitas koordinasi di bidang intelijen daerah terhadap kerawanan sosial serta perlintasan dan pergerakan orang asing, tenaga kerja asing dan ormas asing.
6. Meningkatkan transparansi pelayanan publik urusan Kesbangpol.

Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta mengemban tugas besar untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan amanat Pergub DKI Jakarta dalam mewujudkan kesatuan bangsa dan politik di Jakarta. Tugas pokok yang dimiliki Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta adalah merumuskan kebijakan teknis, merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, dan melaksanakan tugas-tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik meliputi pemantapan integrasi bangsa, pengembangan demokrasi dan hak asasi manusia, pengembangan hubungan kelembagaan, dan kewaspadaan di Jakarta. Sebagai daerah khusus ibukota negara, Jakarta adalah wilayah yang padat dengan 10,37 juta jiwa penduduk, dalam luas wilayah 662,33 km² dan lebih dari 110 buah

pulau yang tersebar di Kepulauan Seribu. Dengan gambaran demografi yang demikian, ditambah struktur sosial yang kompleks dan dinamis membuat permasalahan kesatuan di Jakarta menjadi krusial. Di sinilah tugas dan fungsi Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta sebagai lembaga yang berkapasitas melaksanakan bidang kesatuan bangsa dan politik, mengelola dinamika heterogenitas sosial di Jakarta, dan mencegah disintegrasi sosial melalui perencanaan dan pelaksanaan giat.



Gambar 4.1: Struktur Organisasi Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta

Sumber: <http://bakesbangpoljakarta.com> (2017)

4.1.2 Posisi Strategis Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta dalam Pengelolaan Ormas di Jakarta

Ormas merupakan wadah masyarakat untuk berserikat dan berpendapat, sesuai dengan konstitusi yakni Undang-undang Dasar 1945 amandemen keempat yang tercantum setidaknya dalam beberapa pasal terkait, seperti Pasal 28 C tentang hak memajukan diri dan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk masyarakat, bangsa dan negaranya; Pasal 28 E (2) tentang kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan bersikap sesuai hati nurani, hak berserikat, berkumpul dan berpendapat; serta Pasal 28 F tentang hak berkomunikasi untuk mengembangkan pribadi & lingkungan.

Sejak era reformasi hingga kini, ormas tumbuh dan berkembang pesat di DKI Jakarta. Setiap ormas memiliki visi-misi, karakteristik, dan pola yang berbeda. Jika dilihat sepintas, menjamurnya ormas ini merupakan cerminan positif keaktifan masyarakat dalam berpartisipasi sebagai warga negara. Namun seiring perkembangannya, perlu ditinjau lebih jauh yakni pada aspek esensinya. Perlu dilakukan refleksi kembali, apakah keaktifan sejumlah ormas dalam menggiatkan aksinya di bawah supremasi kebebasan warga negara, apakah sesuai dengan esensi kebebasan yang bertanggungjawab, baik pada ranah substansi dan etika. Lantas, siapkah ormas ini menerima sanksi sosial serta bahkan sanksi hukum apabila yang dilakukannya melanggar ketetapan hukum? Artinya, kebebasan yang menaungi kegiatan ormas ini jelas tidak boleh mencederai nilai-nilai ketertiban, keutuhan bangsa, serta nilai keagamaan dan kearifan lokal masyarakat.

Sayangnya, oknum anggota ormas acapkali terlibat dalam aksi konflik dan kekerasan, bahkan dalam konfrontasi dengan ormas lainnya. Padahal, tujuan implementasi ekspresi kebebasan

dalam konteks Hak Asasi Manusia bermuara pada perdamaian, oleh karenanya prinsip kesatuan, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat harus dirawat. Di sinilah posisi strategis instansi pemerintah daerah dapat dilihat kewenangannya, dalam hal ini mengacu sebagai pelaksana UU Ormas sekaligus koordinator tim terpadu penanganan ormas yakni Bakesbangpol Provinsi. Secara umum, fungsi Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta dijalankan sejak proses perencanaan, melalui kombinasi *top down* dan *bottom up* dengan mengoptimalkan forum Musyawarah Perencanaan dan Pengembangan (Musrenbang) dari tingkat kelurahan sampai tingkat provinsi, yang dikoordinasikan oleh Bapeko/Bapekab dan Bapeda. Forum ini turut membahas kegiatan pembinaan/pemberdayaan ormas, hingga penanganan konflik yang melibatkan ormas.

Adapun tugas dan fungsi Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta lebih lanjut terinci dalam Pergub DKI Jakarta Nomor 258 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Setiap subbid dijabarkan tugas dan fungsinya, untuk kemudian dilaksanakan sesuai standar yang berlaku. Secara khusus, di Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta terdapat dua subbidang khusus yaitu Subbidang Ormas dan Subbidang Pemantauan dan Penanganan Konflik Sosial, yang beririsan dengan tema penelitian ini yakni manajemen konflik antar ormas di Jakarta. Bakesbangpol DKI Jakarta pada tingkat provinsi diberikan keistimewaan dengan adanya pembagian subbidang tersebut. Mengingat pada tingkat lebih rendah yakni tingkat kota, Bakesbangpol Jakarta memusatkan giat pemantauan ormas dan penanganan konflik hanya di bidang ketahanan secara umum.

4.1.3 PP, FBR, dan FPI sebagai Representasi Ormas Besar di Provinsi DKI Jakarta

Penelitian ini mengambil tiga sampel ormas besar di DKI Jakarta yang dapat merepresentasikan tipologi golongan, yakni golongan nasionalis, golongan lokal suku, dan golongan Islam. Ketiga ormas tersebut adalah PP, FBR, dan FPI. Posisi ketiga ormas tersebut dalam penelitian ini yakni sebagai narasumber yang dikonfirmasi, diumpam balik dan dihimpun pendapatnya, untuk selanjutnya ditriangulasi kembali dengan narasumber utama yakni Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta.

4.1.3.1 Pemuda Pancasila



Pemuda Pancasila adalah sebuah organisasi yang pada awalnya berbasis kepemudaan, didirikan oleh Jenderal A.H. Nasution pada 28 Oktober 1959. Sejak tahun 1981, ormas ini dipimpin oleh Japto Soerjosoemarno. Nama ormas ini mengacu pada Pancasila, “lima prinsip” resmi dari negara Indonesia. Fase pendiriannya di pengujung tahun 50-an ditandai dengan perjuangan politik untuk menyelamatkan Pancasila dan UUD 1945, sebagaimana diamanatkan oleh

Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Pada fase inilah, karakter organisasi dan orientasi ideologi Pemuda Pancasila terbentuk. Manifestasi dari karakter organisasi dan orientasi ideologis dimaksud tersermin dari sikap dan komitmennya yang teguh untuk tetap mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara dan perekat keBhinnekaan bangsa. Fase perjuangan Pemuda Pancasila di era 60-an ditandai dengan pergulatan melawan kekuatan PKI dan antek-anteknya yang berupaya mengubah ideologi negara dengan paham komunis. Kini, ormas yang berkantor sekretariat di Pejaten-Jakarta Selatan itu terus berupaya mengawal Pancasila sebagai ideologi bangsa. Seperti yang dipaparkan Yahya Abdul Habib, S.E., selaku Sekretaris Bidang Ekonomi dan Pemberdayaan MPW Pemuda Pancasila DKI Jakarta, dalam wawancara dengan peneliti di kantor Pemuda Pancasila Jakarta Timur (26 Januari 2018):

“Pemuda Pancasila adalah organisasi yang awalnya basis kepemudaan, lalu kemudian berubah menjadi organisasi kemasyarakatan berdasarkan munas. Di Pemuda Pancasila ada pokok-pokok perjuangan *kalo* mengacu pada AD/ART yaitu 1) menjaga, mengamankan, dan mengamalkan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa dan ideologi negara; 2) melaksanakan UUD 1945 sebagai konstitusi negara; 3) mempertahankan kedaulatan dan keutuhan NKRI dan menjunjung tinggi semangat bhinneka tunggal ika; 4) melahirkan kader Pemuda Pancasila sebagai kader bangsa yang konsisten menjaga kehormatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta pergaulan internasional, dan 5) melaksanakan pemberdayaan dan pengembangan anggota secara terus-menerus untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan anggota dan keluarga Pemuda Pancasila. Pemuda Pancasila punya dua cabang basis resmi, yaitu Sapma (untuk pelajarnya) dan Srikandi (untuk perkumpulan wanita). Nah itu berinduk ke kita. Pemuda Pancasila kurang lebih di Jakarta sendiri ada 11.000 anggota. Kegiatan kita sama seperti ormas-ormas lain *sebenarnya*, ada rakernas,

rakerwil, diklat, dan seterusnya. Mungkin bedanya sih di Pancasila-nya itu ya. Pemuda Pancasila tentunya sebagai ormas yang sudah lama nih jelas tidak perlu diragukan lagi, betapa berdarah-darahnya dulu kita jaga itu Pancasila jaga Indonesia dan *alhamdulillah* berhasil.”

4.1.3.2 Forum Betawi Rempug (FBR)



FBR merupakan wadah perjuangan masyarakat Betawi untuk kembali memperjuangkan hak-hak lokalitasnya sebagai suku Betawi --sang empunya rumah DKI Jakarta, yang dianggap mulai tergerus eksistensinya baik secara struktural maupun kultural. FBR didirikan 29 Juli 2001 di Cakung, Jakarta Timur. Para penggagas FBR adalah tokoh-tokoh muda Betawi. Adapun tujuan didirikannya FBR yakni sebagai berikut.

1. Membina hubungan persaudaraan yang kokoh di antara sesama masyarakat Betawi dan masyarakat lainnya demi terciptanya kehidupan yang aman, nyaman, dan damai.
2. Membina hubungan kerjasama dengan pemerintah dalam melaksanakan upaya pemberdayaan masyarakat demi tercapainya kesejahteraan sosial.

3. Meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat Betawi melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan, serta penyaluran kerja.
4. Meningkatkan peranan masyarakat Betawi dalam berbagai aspek kehidupan.
5. Melestarikan dan mengembangkan seni budaya Betawi sebagai bagian dari kebudayaan nasional.

Seperti yang diungkapkan oleh Lutfi Hakim, M.A., dalam wawancara dengan peneliti di Cakung-Jakarta Timur (30 Januari 2018), Lutfi sebagai pendiri sekaligus ketua umum ormas FBR menjelaskan sebagai berikut:

“FBR lahir dari kegelisahan *temen-temen* pemuda Betawi. Dengan berkembangnya Jakarta menjadi ibukota metropolitan ini mau tidak mau mempengaruhi masyarakat Betawi. Di sisi lain, daya *survival* masyarakat Betawi kurang. Banyak orang stereotipe masyarakat Betawi dianggap pemalas. Gaya hidup hedonis materialistis mulai merambah. Sehingga perlu diantisipasi dengan budaya. Tanpa menafikan budaya asing, tapi bisa jadi khasanah karena tidak diterima dengan begitu saja. Situasi seperti itu diistilahkan eceng gondok, ke bawah tidak berakar, ke atas tidak berdahan. Ini menjadi tanggung jawab kita. Juga tentang bagaimana membina hubungan kerjasama dalam memberi kontribusi pembangunan di Jakarta. Kalau ada orang yang merasa diuntungkan dengan kemajuan Jakarta, nyatanya secara struktur maupun kultur masyarakat Betawi dimarjinalkan. FBR hadir mengisi sisi-sisi yang kosong tersebut. Intinya mengembalikan pertahanan budaya Betawi... kurang lebih *alhamdulillah* kita punya 400.000 anggota ya sekarang se-Jabodetabek. Saya terima laporan tiap bulan *tuh* minimal 300 anggota baru masuk gabung ke FBR. Kegiatan kita, sebagaimana ormas lainnya ada rapat bulanan, rapat korwil, di FBR ada namanya gardu untuk lingkup terkecil. Nah kadang AD ART diabaikan karena kita fokus pada budaya. Kegiatan-kegiatan kita juga banyak tradisi Islam, karena watak karakter masyarakat Betawi yang religi. Misalnya ada

tradisi tasawuf. Kita juga kegiatan lainnya menginventarisir padepokan silat sebisa mungkin.”

4.1.3.3 Front Pembela Islam (FPI)



FPI dideklarasikan pada 17 Agustus 1998 (atau dalam kalender Islam yakni 25 *Rabiuts Tsani* 1419 H) di Pondok Pesantren Al-Um Ciputat, Tangerang Selatan oleh sejumlah ulama dan aktivis muslim dengan disaksikan ratusan santri yang berasal dari daerah Jabotabek. Sebagaimana yang disampaikan Awit Mahsyuri – Sekjen DPP FPI, pada wawancara langsung dengan peneliti di Markas FPI Petamburan, Jakarta Barat (2 Februari 2018) bahwa pendirian organisasi ini hanya empat bulan setelah Presiden Soeharto mundur dari jabatannya. FPI dibentuk dengan tujuan menjadi wadah kerja sama antara ulama dan umat dalam menegakkan *Amar Ma'ruf* dan *Nahi Munkar* di setiap aspek kehidupan bermasyarakat. Awit memaparkan sejarah dan tujuan pembentukan FPI sebagai berikut:

“Front Pembela Islam adalah merupakan ormas yang berasaskan Islam, berakidahkan *ahlusunah wal jamaah*. Bermazhab fiqihnya mayoritas tentu mazhab Imam Syafi'i. Latar belakang lahirnya FPI di saat itu

terjadi euforia pasca lengsernya Presiden RI Bapak Soeharto, di mana dulu sewaktu Pak Harto masih jadi presiden beliau otoriter. Begitu yang ditakuti lengser ya tentu euforia, ditambah saat itu suhu politik dahsyat. Begitu reformasi perjudian di mana-mana, orang mabuk udah luar biasa, tempat hiburan tidak terkontrol lagi dari pagi ketemu pagi. Kami melihat kalau ini tidak disikapi akan berbahaya. Maka para *habaib* dan ulama saat itu mendeklarasikan FPI. Semangatnya untuk menegakkan dakwah dan menggelorakan *jihad fisabilillah*.”

Terdapat tiga latar belakang pendirian FPI yakni 1) adanya penderitaan panjang umat Islam di Indonesia karena lemahnya kontrol sosial penguasa sipil maupun militer akibat banyaknya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh oknum penguasa; 2) adanya kemunkaran dan kemaksiatan yang semakin merajalela di seluruh sektor kehidupan, dan 3) adanya kewajiban untuk menjaga dan mempertahankan harkat dan martabat Islam serta umat Islam. Adapun bentuk kegiatan ormas yang berpusat di Petamburan-Jakarta Barat ini tertuang dalam berbagai bentuk, utamanya seperti dakwah dan syiar, aksi kemanusiaan, aktivisme orasi menyuarkan dan mengkritik pemerintah jika dianggap tidak sejalan dengan prinsip yang dianut, *sweeping* tempat hiburan malam serta pelacuran, dan seterusnya. Secara struktural, FPI merupakan ormas besar yang memiliki tata prosedur formal. FPI memiliki dewan majelis pengurus pada berbagai tingkat mulai dari dewan pimpinan pusat, cabang, wilayah, kecamatan, hingga kelurahan (diistilahkan FPI dalam kata ‘ranting’). Ormas ini diklaim oleh Awit memiliki kurang lebih 1.000.000 anggota dan simpatisan di Jakarta. Lebih lanjut, Awit Masyhuri menjelaskan tata struktur organisasi FPI sebagai berikut.

“Struktur organisasi FPI *nih* awal ada ketua majelis syuro dan ketua umum. Pasca munas ketiga berubah, jabatan tertinggi adalah imam besar. Ada sekum, bendum, ada wakil-wakilnya juga yang bantu. Kemudian ada ketua-ketua bidang, misalnya bidang dakwah, bidang amar ma’ruf, bidang nahi munkar, bidang jihad, bidang penegakan khilafah. Itu jabatan-jabatan di bidang tanfizi. Kita juga ada sayap juang, misalnya ada LPI (Laskar Pembela Islam) ibarat tentaranya *gitu lah*, lalu ada Mujahidah Pembela Islam, Front Mahasiswa Islam, Serikat Pekerja Islam, ada Lembaga Dakwah Front *nah* kalau ini keliling ke majelis-majelis. Ada juga Badan Hukum Front, Radio FPI, Lembaga Informasi Front untuk memberi info ke umat tentang FPI misalnya tv, website. Ada Badan Anti Teror yang tugasnya menjaga ulama, para *habaib* pengurus. Ada Badan Investigasi Front untuk mencari data dan sebagainya... Kita ada AD/ART dibahasnya ketika munas ya dulu 5 tahun ya. Sekarang 7 tahun ya.”

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Fenomena Konflik Antar Ormas di Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2014-2017

Ormas yang berkembang pesat di Jakarta dengan beragam latar belakang dan misinya, mau tidak mau secara inheren memang berpotensi konflik. Namun demikian fakta di lapangan, justru akar konflik yang melibatkan ormas tidak terletak pada perbedaan idealisme ataupun visi-misi ormas tersebut. Melainkan, akar konflik yang sering melibatkan ormas di Jakarta sebetulnya banyak bersumber dari persoalan pribadi anggota ormas tersebut. Sebagaimana dikatakan Eliazer Hutapea, S.E., M.M selaku Kepala Subbidang Ormas Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta dalam wawancara dengan peneliti (10 Januari 2018):

“Konflik itu memang inheren, kita sebagai manusia saja lahir sudah berbeda-beda. Ada perbedaan sudah tentu ada konflik. Tantangannya bagaimana kita mampu mengelolanya. Sama halnya dengan ormas. Nah kalau kita

bicara ormas yang sering berkonflik karena perbedaan, malah sebetulnya banyaknya karena persoalan pribadi yang mungkin saja sepele, tetapi kemudian menjadi besar.”

Data rekapitulasi Polda Metro Jaya yang merangkum konflik antar ormas pun menunjukkan bahwa konflik antar ormas di Jakarta bersumber dari persoalan ekonomi, persoalan pribadi atau sentimen segelintir pihak atas nama atribut ormas, yang sejatinya bukan menunjukkan oposisi ideologi atau visi misi resmi antar ormas. Seperti dikutip dari Data Kasus Konflik Antar Ormas di Wilkum Polda Metro Jaya Tahun 2014-2017, yang dirilis terbatas untuk penelitian ini via Direktorat Intelijen dan Keamanan (Intelkam) Subdit VI Polda Metro Jaya.

Tabel 4.1: Konflik Antar Ormas di Provinsi DKI Jakarta dalam kurun waktu Tahun 2014-2017

NO	HARI/ TGL	KASUS	TKP	KRONOLOGIS	KET.
1	Jum'at, 18 April 2014 jam 04.00 WIB	Peng- rusakan Gardu /Bendera FBR	Kel. Joglo Kembangan, Jakarta Barat	<p>Pelaku : Lidik</p> <p>Uraian kejadian telah terjadi pengrusakan Gardu FBR 0247 (Kramat Mujur) oleh orang yang tak dikenal. Adapun yang dirusak adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Plakat yang bertuliskan Gardu FBR 0247; 2. Bendera FBR dibakar. <p>Terkait kejadian tersebut hampir bersamaan juga telah terjadi Pengrusakan Gardu FBR 167 Kedoya Selatan Kebon</p>	Kasus ditangani Sektro Kembangan

				<p>Jeruk Jakbar dan Gardu FBR 280 Jaksel. Pada pukul 11.30 Wib Polsek Kembangan mendapat laporan dari pimpinan Gardu 0247 Kramat Mujur Sdr. Bek/Rusdi Jl. TPU Joglo yang menginduk ke Korwil Selatan. Selanjutnya 10 Personil Polsek kembangan dipimpin Kapolsek langsung mengecek TKP dan memberikan arahan kepada Sdr. Bek/Rusdi untuk menahan diri dan tidak terpancing dengan kejadian tersebut.</p>	
2	Minggu, 27 April 2014 jam 09.00 WIB	Keributan antar Ormas Pemuda Pancasila (PP) dan Front Betawi Rempug	<ul style="list-style-type: none"> - Perumahan Puri Beta Kel. Larangan Cileduk Raya Cileduk Tangerang - Jl. Musyawarah Rt. 015/02 Kel. Joglo Kembangan JB 	<p>Uraian kejadian sekitar pukul 09.00 wib di Jl. Puri Beta Cileduk Raya terjadi keributan antara ormas yg mengatasnamakan Pemuda Pancasila (PP) dan FBR di Perumahan Puri Beta Kel. Larangan, Cileduk, tangerang. Yg sampai saat ini blm diketahui sebabnya. Dari kejadian tersebut berimbas kewilayah Joglo Kembangan Jakarta Barat. Sekitar pukul 11.30 Wib di Jl. Musyawarah Rt.015/02 Kel. Joglo, Kembangan JB, telah terjadi pengerusakan Pos Pemuda Pancasila (PP) (dibohkan dan dibakar), yang dilakukan oleh ±100 orang menggunakan ±50 unit KR2 dengan wajah tertutup muka/cadar membawa</p>	Kasus ditangani Resta Tangerang

				sebuah Kayu dan sajam. Kemudian tak jauh dari TKP 2 unit KR4 Toyota Avanza warna Hitam, nopol: B-1005-VLG, sedang latihan menyetir, juga dirusak kaca depan dan samping dekat setir di pecahkan dengan sebilah golok dan korban diancam dengan sebilah celurit, pelaku pun merampas HP BleckBerry milik korban.	
3	Senin, 02 Juni 2014 jam 19.00 WIB	Pengania- yaan	Dekat pos Forkabi, Jl. A Gg. X Kel. Karang Anyar Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat	Korban: Syamsudin Syafei, 47th Pelaku : Oji Saksi : Taryat Uraian kejadian menurut keterangan saksi bahwa pelaku datang ke tempat kerja korban, kemudian korban diajak oleh pelaku ke TKP. Selanjutnya korban ditanya oleh pelaku "Siapa yang membongkar tembok pos Forkabi". Kemudian dijawab korban "tidak tahu". Selanjutnya pelaku memukul korban sebanyak 5 kali dibagian dada sebelah kiri hingga korban mengalami luka memar dan terasa sakit.	Kasus ditangani Sektro Sawah Besar
4	Senin, 09 Juni 2014 jam 01.20	Pengrusak an Pos FBR	Pos FBR Kramat Mujur Gardu 0247, Jl. Raya Makam Joglo	Saksi : Rusdi Al Beck Uraian kejadian pada hari Senin tanggal 09 Juni 2014 pukul 01.20	Kasus ditangani Restro Jakarta Barat

	WIB		Rt. 08/03 Kel. Joglo Kec. Kembangan Jakarta Barat	Wib telah terjadi pengrusakan Pos FBR Kramat Mujur Gardu 0247 Pim. Sdr. Rusdi Al Beck oleh orang tidak dikenal menggunakan 20 unit KR2. Atas kejadian tersebut 1 unit kulkas dirusak dan 1 kipas angin dan 1 unit mesin cuci steam diambil oleh para pelaku. Korban jiwa nihil selanjutnya info dari Sdr. Rusdi Al Beck sekitar pukul 02.00 Wib terjadi benturan antara pelaku dengan warga Babulminan Joglo. Menurut informasi dari anggota Cileduk bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2014 sekitar pukul 17.25 Wib telah terjadi keributan sekelompok pemuda yang diduga Ormas FBR dengan PP (Pemuda Pancasila) TKP di Puribeta I tepatnya disebrang Warnet Sniper Kel. Larangan Utara Kec. Larangan Kota Tangerang terdapat 1 orang korban luka akibat pukulan benda tumpul dan tajam yang mana korban tersebut mengaku dari Ormas PP (Pemuda Pancasila) saat korban sudah dalam penanganan di RS. Sari Asih.	
5	Selasa 10 Juni 2014 jam 14.15	Keributan FBR vs PP	Pos FBR Gardu 0276 Kamat Jl. Anggrek Garuda RW.	Korban : 1. Supriyadi, umur 33 tahun alamat kebon sayur rt.12/03 kemanggisan	Kasus ditangani Sektro Palmerah

	WIB		02 Kel. Kemanggisan, Palmerah Jakarta Barat	<p>2. Junaidi, umur 17 tahun, alamat kebon sayur rt.12 /3 kemanggisan</p> <p>3. Muhammdad fauzi, umur 17 alamat kbn sayur rt.12 /03 kemanggisan</p> <p>Uraian kejadian telah terjadi penyerangan terhadap Gardu FBR di TKP oleh massa yang mengatasnamakan PEMUDA PANCASILA sekitar 20 orang menggunakan motor sambil membawa Sajam jenis pedang. korban sedang main playstation selanjutnya mesin playstation dibawa pelaku, ketiga korban luka tangan dan kaki akibat menghindar.</p>	
6	Rabu, 02 Juli 2014 jam 02.00 WIB	Pengrusakan Gardu FBR 0247 Kramat Mujur	Kramat Mujur Joglo Kembangan Jakarta Barat	<p>Korban :</p> <p>1. Usmadi, 28th, luka akibat benda tajam dari FBR pada bagian punggung dan dada sudah dibawa pulang ke rumah</p> <p>2. Yopi, 25th, luka pada bagian tangan dan masih dirawat di RS. Aminah</p> <p>Uraian kejadian sekitar pukul 02.00 Wib Polsek Metro kembangan mendapat telp. dari ket. G.FBR 0247 Keramat Mujur Joglo Sdr. Rusli Bek bahwa G. FBR 0247 telah diserang dan dirusak oleh sekelompok orang tidak dikenal ± 200</p>	Kasus ditangani Sektro Kembangan

				<p>orang lengkap dengan membawa senjata tajam menggunakan KR R2. Sekitar jam 02.15 Wib Polsek Metro Kembangan sampai di TKP Situasi sudah menyepi dan membawa 2 korban dari Gardu FBR ke RS. Medika Permata Hijau Sdr. Usmadi dan di RS. Aminah Sdr. Yopi. Duduk permasalahan belum diketahui, sementara ini permasalahan ditangani oleh Polsek Metro Kembangan.</p>	
7	Jum'at, 11 Juli 2014 jam 20.00 WIB	Penganiayaan, korban MD	Gardu Ormas Singa Liar 332, Jl. Maun Gg. Maun dekat Universitas Stekpi Kalibata Pancoran Jakarta Selatan	<p>Korban : Syahrul Ramadhan, 20th (anggota ormas FBR) Pelaku :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Samsul Fuad alias Abud (FBR). 2. Ismail alias lil (FBR). <p>Uraian kejadian korban saat itu berada di pos tiba-tiba di datangi sekelompok rekannya sendiri yang juga dari satu ormas. Kedua orang tersebut langsung menyabetkan cluritnya dan mengenai dada di sebelah kiri korban menembus jantungnya. Korban sempat dibawa ke RS. Jaya Dipa namun nyawa korban tidak dapat terselamatkan. Berdasarkan hasil penyelidikan petugas Kepolisian kedua pelaku masih ada hubungan keluarga dengan korban, diduga antara pelaku dan</p>	Kasus ditangani Sektro Pancoran

				korban rebut masalah lahan parkir. Pelaku setelah membacok korban melarikan diri.	
8	Minggu, 10 Agustus 2014 pukul 16.00 WIB	Pengrusakan Pos PP	Pos Pemuda Pancasila di Jl.KH.Abdul Rohim No.8 RT.003/02 No.20 Kel. Kuningan Barat Kec. Mampang Prapatan, Jaksel	<p>Pelaku : Ormas FBR</p> <p>Saksi : Suhari</p> <p>Uraian kejadian menurut saksi Bp.Suhari, pengrusakan pos PP dilakukan oleh ormas FBR dengan jumlah sekitar 50 orang dan saksi pun sempat dikalungin celurit oleh palaku, sambil menanyakan anak PP atau bukan. Saksi menjawab 'saya hanya tukang ojek', tidak lama kemudian anak FBR langsung melempari kaca jendela Pos bagian bawah, kaca pintu, kaca jendela atas, selain itu FBR juga merusak isi yang ada di dalam Pos. Sebelum ke Pos PP, anak FBR sempat muter balik di Santa dengan menggunakan sepeda motor dan membawa bambu berikut sajam. Setelah melakukan pengrusakan pos PP, pelaku dari pok FBR langsung meninggalkan TKP mengarah Pancoran. Pos Pemuda Pancasila) merupakan rumah kedua dan juga tempat pertemuan/rapat Bp.H.Tambul (Pengusaha Tanah)</p>	Kasus ditangani Sektro Mampang Prapatan

				yang merupakan salah satu donatur Ormas PP.	
9	Minggu, 10 Agustus 2014 pukul 16.00 WIB	Pengrusakan Gardu FBR	Mampang Prapatan Jaksel	<p>Pelaku : Ormas PP</p> <p>Korban :</p> <p>1. Ahmad Fatoni, 30 Thn (luka bacok dikepala bagian atas dan mata memar)</p> <p>2. Ahmad Sapiudin (Apoy), 49 Thn (Ketua gardu FBR Mampang Prapatan, mengalami luka lebam dimata kanan dan kiri, pipi kanan dan kiri).</p> <p>Uraian kejadian pada pukul 16.30 WIB, massa Pemuda Pancasila yang telah berkumpul di TKP awal langsung mengumpulkan massa dari PP sekitar 50 orang. dan dengan membawa sajam melakukan konvoi dengan menggunakan ± 25 sepeda motor serta melakukan pengrusakan terhadap Posko FBR, adapun gardu yang dirusak, sebagai berikut :</p> <p>1. Gardu FBR G 0234 yang terletak di Jl. Poncol Jaya RW. 05 Kuningan Barat Mampang Prapatan Jaksel.</p>	Kasus ditangani Sektro Mampang Prapatan

				<p>2. Gardu FBR G 0234 yang terletak di Gg. Jati Jl. Kapt. Tendean Mampang Prapatan Jaksel.</p> <p>3. Gardu FBR G 0280 yang terletak di Jl. Bangka IX</p> <p>4. Gardu FBR G 0234 yang terletak di Jl. Mampang Prapatan VIII Jaksel.</p> <p>Selain merusak gardu FBR, ormas PP juga melakukan pengeroyokan terhadap korban. saat korban 1 keluar dari ATM langsung dikeroyok oleh 25 orang dari Ormas PP, sedangkan korban 2 dikeroyok pada saat memberikan nasehat kepada anggota PP di depan kantor PP, Jl Abd. Rohim Kuningan Barat Mampang Jaksel.</p>	
10	Rabu, 13 Agustus 2014, jam 02.30 WIB	Pengrusakan Gardu FBR	Gardu Semut Ireng, Jl. Syafii Hadzami Rt. 001/05 Kel. Keb. Lama Utara Kec. Keb. Lama Jaksel	<p>Saksi : Aris Margono, 36 Thn (Tukang Sapu Gereja Adven)</p> <p>Pelaku : Lidik</p> <p>Uraian kejadian menurut keterangan saksi, pada saat saksi sedang tidur disalah satu kamar di Gereja mendengar suara kaca pecah, lalu saksi keluar kamar dan mendapati kaca aula Gereja sudah pecah</p>	Kasus ditangani Sektro Keb. Lama

				akibat lemparan batu dan saksi melihat ada sekelompok orang menggunakan \pm 10 motor diseberang jalan lari kearah Barat Jl. Arteri. Bahwa Posisi Gardu FBR berdekatan dengan Gereja Adven dan saat itu gardu tersebut masih dalam tahap perbaikan/pembangunan karena terbakar.	
11	Selasa 2 September 2014 jam 02.00 WIB	Pengero- yokan FBR Vs PP	Jl. Pancoran Timur II No. 04, Kel. Cikoko, Kec. Pancoran Jaksel	Korban: Herwanto, 20 TH Pelaku: Sekelompok pemuda \pm 26 orang diduga dari FBR. Saksi: 1. M. Nur Yudo. 2. Salam Uraian kejadian pelaku yang berjumlah \pm 26 orang mengendarai sepeda motor mengaku dari FBR mendatangi TKP selanjutnya pelaku mengrusak dan membakar 2 buah warung yang bercat/bercorak PP (Pemuda Pancasila), setelah itu pelaku mendatangi Satpam, kemudian pelaku membacok korban yang sedang tidur dengan menggunakan stik golf, setelah membacok pelaku langsung pergi. BB: Sebotol bensin dan stik golf.	Kasus ditangani Sektro Pancoran
12	Jum'at, 5 September 2014	Pengrusa- kan Gardu FBR oleh PP	Jl. Rajawali Barat I RT 09/04 Kel. Rajawali Kec	Pelaku : sekelompok warga diduga dari ormas PP	Kasus ditangani Sektro Pancoran

	jam 02.30 WIB		Pancoran Jaksel	Saksi : Alex Saipul, Yongki dan Cepoy Uraian kejadian pelaku secara bersama-sama melakukan pengrusakan terhadap pos FBR Gardu 0327 pelaku diduga ormas dari PP (Pemuda Pancasila) dengan cara memecah kaca depan pos, AC Pos dan sebuah gerobak mie. BB : 2 buah unit Kr R2 merk Honda Vario No. Pol B-3967-SCZ dan Honda Revo No. Pol B-3296-TFF.	
13	Sabtu, 13 Sep- tember 2014 pukul 03.00 WIB	Pengrusa- kan Pos PP dan Pengero- yokan	Di Ujung Jl. Durian Rt. 06/04 Kel. Jagakarsa Jaksel	Korban : 1. Widadi, 31 Thn (Supir Angkot M- 36, luka bacok pada bagian kepala sebelah kiri, 3 jahitan) 2. Heri, luka ringan Saksi : 1. Mursidi, 27 Thn, 2. Suhendra, 40 Thn, 3. Jajang, 31 Thn Uraian kejadian menurut keterangan para saksi, melihat sekelompok orang datang dari arah Jl. Durian dengan mengendarai sepeda motor sambil meneriakkan Pancasila sambil mengacungkan parang dan clurit, lalu masuk kedalam	Kasus ditangani Sektro Jagakar- sa

				<p>warteg milik saksi 3 dan melakukan penyerangan terhadap orang yang sedang makan/minum di Warkop secara membabi buta (memukul dengan stick golf dan Sajam) hingga mengakibatkan 2 korban terluka. Setelah melakukan pengeroyokan terhadap korban, para pelaku kemudian melakukan pengrusakan terhadap Pos PP dengan membakar sebuah kursi sofa yang ada di dalam Pos. lalu para pelaku bergerak menuju kearah Jl. Jagakarsa Raya arah Jl. Kahfi II. Selanjutnya korban 1 dibawa ke RS. Fatmawati guna mendapatkan perawatan.</p>	
14	Sabtu, 27 September 2014 pukul 15.15 WIB	Penganiayaan dan pengeroyokan terhadap anggota Pemuda Pancasila	Jl. Bango Raya Pondok Labu Kec. Cilandak Jaksel	<p>Korban :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Harsulan, 48 Thn (Ormas PP, luka pada bagian kepala belakang) 2. Rizal Manaf Saputra, 34 tahun (diduga Ormas FBR, luka bacok pada bagian pinggang kiri dan tangan 	Kasus ditangani Sektro Cilandak

				<p>sebelah kiri) Pelaku : Lidik</p> <p>Uraian kejadian menurut keterangan korban 1, korban berencana menghadiri acara rapat yang diadakan oleh Ormas PP dirumah ketua Ormas PP H. Thoriq Mahmud. Pada saat korban 1 melintas di Jalan Bango Raya, korban 1 diserang sekelompok orang tak dikenal berjumlah sekitar 10 orang dengan menggunakan kendaraan roda dua. Korban 1 mengalami luka pada bagian kepala belakang. Atas kejadian tersebut, selanjutnya korban mengabari teman-temannya anggota ormas PP. kemudian anggota ormas PP sekitar 50 orang dengan menggunakan KR2 melakukan aksi sweeping di sepanjang Jl. RS. Fatmawati Raya dari dapur susu sampai Pasar Pondok Labu, ketika melintas di Jl. RS. Fatmawati Raya depan proyek pembangunan apartement admiralty melihat seorang laki-laki yang diduga sebagai anggota ormas FBR, kemudian orang tersebut dikeroyok hingga mengalami luka bacok pada bagian pinggang kiri dan tangan sebelah kiri. Korban</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>diketahui berna Rizal Manaf Saputra, 34 tahun.</p> <p>Anggota ormas PP yang diamankan oleh Polsek Cilandak :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wahyu Hidayat, 25 Thn 2. Beni Ferdiansyah, 40 Thn 3. Rudi Rahmat, 50 Thn <p>Andri Sofan, 28 Thn.</p>	
15	Selasa 6 Januari 2015 pukul 17.00 WIB	Pengrusakan dan Penyera-ngan diduga dilakukan oleh anggota Ormas Pemuda Pancasila (PP)	Jl. KH. Ajami Rt. 02/06 Keb. Lama Utama Keb. Lama Jaksel (dekat Gardu FBR Gandaria)	<p>Korban :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tri Aryadi Al Borik, 42 Thn (pemilik mobil); 2. Edo (mengalami luka dibagian perut dan kedua telapak tangan) 3. Abas (menderita luka sayat dibagian lengan kanan) <p>Pelaku : diduga anggota ormas Pemuda Pancasila (PP)</p> <p>Saksi : Aris Margono, 36 Thn</p> <p>Uraian kejadian telah terjadi penyerangan dan pengrusakan oleh ± 20 orang tidak dikenal dengan menggunakan senjata tajam dan sepeda motor terhadap mobil Toyota Avanza warna hitam tahun 2008 dengan Nopol B 2111 NE milik korban Sdr. Tri Aryadi Al Borik yang terparkir di dekat Gardu FBR Gandaria (TKP). Akibat penyerangan tersebut</p>	Kasus ditangani Sektro Keb. Lama

				<p>mobil korban 1 mengalami kerusakan berupa pecah kaca depan dan belakang serta penyok pada body mobil sebelah kanan, selain itu hp dan las korban 1 yang ada di dalam mobil juga diambil pelaku. Menurut keterangan korban 1, bahwa korban mengenali salah satu pelaku penyerangan dan pengrusakan yaitu Sdr. Dedi Suherman alias The Max (anggota ormas PP Jakarta Barat).</p>	
16	Rabu, 05 Agustus 2015 pukul 01.00 WIB	Pengrusakan Pos Bayangan Pemuda Pancasila	Pos Bayangan Pemuda Pancasila, Jl. Ulujami Raya Rt. 013/05 Kel. Ulujami Kec. Pesanggrahan Jaksel	<p>Pelaku : Lidik Saksi : Duha</p> <p>Uraian kejadian pengrusakan tersebut diketahui oleh saksi pada pagi hari sekitar pukul 06.00 WIB pada saat saksi melintasi TKP yang selanjutnya dilaporkan kepada ketua Ranting PP Ulujami sdr. Agung Setiawan als Billy. Dan oleh sdr. AGUNG als BILLY kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Pesanggrahan untuk membuat Laporan Polisi</p>	Kasus ditangani Sektro Pesanggrahan
17	Sabtu, 08 Agustus 2015 pukul 11.50 WIB	Keributan antar Ormas FBR dengan warga pasar Gembrong	dibawah JPO (jembatan penyebrangan orang) Gembrong Jatinegara	<p>Korban : 1. Sumali; 2. Preko</p> <p>Pelaku : Ormas FBR Saksi : Candra</p> <p>Uraian kejadian sekira pukul. 11.50WIB, rombongan Ormas</p>	Kasus ditangani Sektro Jatinegara

				<p>FBR melintas di bawah underpass Gembrong kemudian langsung parkir dibawah JPO (jembatan penyebrangan orang) Gembrong langsung menyerang seorang Warga (saksi) yang pada saat itu memakai kaos PP, kemudian berusaha membakar pos PP namun dapat dihalau warga (korban) yang mengakibatkan korban luka bacok dipaha sebelah kanan dan korban 2 menderita luka memar. Dan satu sepeda motor jenis Mio Nopol B 3952 SEW. dibakar dan dua unit roda 2 diamankan ke polsek Jatinegara.</p>	
18	Selasa 06 Oktober 2015 pukul 01.30 WIB	Pengrusakan Pos FBR	Pos FBR 0234 Pangeran Kuningan, Jl. Poncol Jaya (samping SPBU Total) Kel. Kuningan Barat Mampang	<p>Korban : Suryadi Pelaku : Lidik Saksi : Ahmad Firdaus, 33 Thn</p> <p>Uraian kejadian telah terjadi pengrusakan gardu fbr 0234 pangeran kuningan di tkp. kerusakan berupa satu unit tv merk polytron 21 inc (pecah layar), 2 unit bendera fbr dicopot, umbul-umbul merah putih di copot dan pintu gardu rusak akibat tendangan kaki dari pelaku pengrusakan. Adapun korban yang pada saat itu ada di TKP Sdr. Suryadi korban luka dibagian</p>	Kasus ditangani Sektro Mampang

				<p>tangan kanan akibat serpihan kaca layar televisi. Menurut keterangan saksi sekitar pukul 01.30 WIB, tiba-tiba ada sekelompok orang tidak dikenal dengan jumlah sekitar 20 orang menggunakan 10 unit motor langsung menghampiri Pos FBR dan menendang pintu. Kemudian setelah pintu terbuka melakukan pengruskan kemudian korban a.n Suryadi yang berada di dalam Pos FBR menyelamatkan diri.</p>	
19	Selasa 10 Mei 2016 pukul 20.30 WIB	Anirat	Jl. Raya Joglo / Jl. Jengkel Rt. 02/02 Kel. Joglo Kembangan Jakbar	<p>Korban : Muhamad Aji Khadafi als Bangor (Anggota PP)</p> <p>Saksi : Fendi (RT 03/01)</p> <p>Pelaku : Lidik</p> <p>Uraian kejadian sekitar jam 16.00 WIB, sesuai keterangan saksi (RT 03/01) telah terjadi keributan di perum puri beta Ciledug Tangerang, yang mana dalam kejadian tersebut anggota Ormas FBR telah mengalami pembacokan namun identitas korban belum diketahui lanjut sekitar jam 20.30 WIB kejadian tersebut merember ke wil hukum Polsek Kembangan tepatnya di Jl. Raya Joglo / Jl.</p>	Kasus ditangani Sektro Kembangan

				<p>Jengkel Rt. 02/02 Kel. Joglo Kembangan Jakbar. Telah terjadi pembacokan anggota ormas PP yang mengalami luka bacok pada leher, lengan, dagu dan punggung. Ketika itu korban sedang melihat di TKP tiba-tiba dari arah belakang korban di tendang sehingga terjatuh kemudian di bacok oleh pelaku sekitar 20 orang mengendarai 10 KR R@. selanjutnya pelaku kabur, kemudian korban dibawa ke RS Medika Lestari Cileduk hingga saat ini masih dalam perawatan.</p>	
20	<p>Minggu, 2 Oktober 2016 jam 12.20 WIB</p>	<p>Anirat terhadap anggota Ormas PP</p>	<p>Lampu Merah depan Guntur, Jl. Sultan Agung Setiabudi Jaksel</p>	<p>Korban : Triwisnu Rinaldo, 34 Thn</p> <p>Saksi : 1. Andi Arsun, 32 Thn; 2. Norman Silitonga, 42 Thn</p> <p>Uraian kejadian menurut keterangan saksi pada pukul 12.20 WIB saksi 1 sedang berboncengan mengendarai sepeda motor dengan korban (Triwisnu) dari arah Manggarai menuju Dukuh Atas. Sesampainya di lampu merah depan Guntur Jaksel kami berhenti. Tiba-tiba saksi didatangi oleh rombongan pawai motor ± 100 orang dari arah Dukuh Atas</p>	<p>Kasus ditangani Sektro Setiabudi</p>

				mengenakan atribut FBR. Kemudian para pelaku mengeroyok dan membacok korban dengan menggunakan celurit, sehingga teman saya terkena bacokan dikepala. Para korban dibawa ke RSCM untuk dilakukan perawatan.	
21	Minggu, 2 Oktober 2016 jam 13.00 WIB	Anirat terhadap anggota Ormas FBR	Jl. Minagkabau Manggarai Setiabudi Jaksel	<p>Korban : Moh. Ali, 42 Thn (anggota FBR 217 Jagakarsa)</p> <p>Saksi : 1. Dafid; 2. Arya; 3. Edi; 4. Panji</p> <p>Menurut keterangan korban pada pukul 13.00 WIB, korban bersama empat teman korban (saksi), sedang mengendarai sepeda motor melintas di TKP ingin menghadiri acara Milad FBR di Jakarta Utara. Tiba-tiba korban dikeroyok ± 10 orang sehingga pergelangan tangan sebelah kiri korban terkena sabetan senjata tajam. Selanjutnya korban dirawat di RSCM.</p>	Kasus ditangani Sektro Setiabudi
22	Minggu, 2 Oktober 2016 jam 12.50 WIB	Pengero-yokan	Jl. Pramuka Raya No. 250 Bengkel Knalpot Kel. Rawasari Cempaka Putih Jakpus	<p>Korban : Bayu, 24 Thn</p> <p>Saksi : 1. Ade Harianto, 27 Thn; 2. Alvian Subekti, 16 Thn</p> <p>Uraian kejadian korban sedang memperbaiki knalpot sepeda motor di TKP, tiba-tiba datang ± 50 orang mengendarai sepeda motor dan memakai atribut FBR,</p>	Kasus ditangani Sektro Cempaka Putih

				<p>pelaku langsung memukuli korban dan yang ada di sekitar TKP, kemudian para pelaku bertanya kepemilikan mobil Toyota Kijang Nopol B 8170 ZZ warna lorang PP, sebagian pelaku menghancurkan mobil tersebut dan sebagian pelaku mengeroyok korban, pelaku ada yang menggunakan clurit dan korban menderita luka robek dibagian tangan kiri. Selesai melakukan aksinya para pelaku langsung pergi.</p>	
23	Minggu, 2 Oktober 2016 jam 11.05 WIB	Keributan antar Ormas FBR dengan PP	Bengkel knalpot Beraling, Jl. Pramuka Raya 250 Kel. Rawasari Cempaka Putih Jakpus	<p>Korban : Bayu Satrio Utomo, 24 Thn (mengalami luka bacokan di lengan sebelah kiri dan dirujuk ke RS Islam Cempaka Putih Jakpus</p> <p>Saksi : 1. Alfian Subekti, 16 Thn (karyawan bengkel); 2. Ade Harianto, 27 Thn (karyawan bengkel)</p> <p>Uraian kejadian pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2016 sekitar 50 orang dari Forum Betawi Rempug (FBR) yang sedang melakukan konvoi dari arah Matraman Jakarta Timur</p>	Kasus ditangani Restro Jakpus

				<p>mengarah ke Koja Jakarta Utara untuk menghadiri ultah FBR melintas di Jl. Pramuka Raya 250 Kel. Rawasari Cempaka Putih Jakarta pusat tepatnya di bengkel kanlpot Bering milik Bp. Maskur (Ketua Pemuda Pancasila (PP) Purbalingga Jateng). Saat melintas di bengkel knalpot Bering tersebut rombongan Forum Betawi Rempug (FBR) melihat ada sebuah kendaraan roda-4 milik Pemuda Pancasila (Pp) yang sedang terparkir, langsung saja mereka turun dan merusak kendaraan tersebut termasuk 2 (dua) buah kendaraan roda-2 yang ada di lokasi tersebut. Melihat kejadian tersebut korban (anak dari Bp. Maskur) berusaha menghentikannya, namun yang bersangkutan dibacok pada lengan kirinya oleh salah seorang rombongan FBR. Adapun kendaraan yang dirusak adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 1 (satu) unit kendaraan roda-4 jenis Kijang Kapsul Nopol B 8170 ZZ milik Pemuda Pancasila (PP) Purbalingga Jawa Tengah, rusak kaca depan dan samping kanan 	
--	--	--	--	--	--

				<p>dan kiri</p> <p>2. 1 (satu) unit kendaraan roda-2 jenis Supra X warna Hitam Mopol E 5834 YL milik Sdr. Sidik Permana, pemilik kios di TKP, rusak jok motor dihancurkan;</p> <p>1 (satu) unit kendaraan roda-2 jenis CBR warna merah Nopol B 64524 PKL milik sdr. Aan Solihin, 22 thn, Jl. Rawasari Selatan I Rt. 015/02 No. 17 Rawasari Cempaka Putih Jakpus (costumer yang sedang membetulkan knalpot), kerusakan lecet-lecet karena digulingkan.</p>	
24	Senin, 30 Januari 2017 pukul 17.15 WIB	Pengrusakan Pos FBR disertai Penganiayaan	Jl. KH. Syafii Hadzami Rt 02/05 Kel. Lama Utara	<p>Pelaku : Lidik Saksi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fauzan Firmansyah, 26 Thn; 2. Doni Ari Ardika, 36 Thn; 3. Ahmad Hasanudin, 32 Thn <p>Uraian kejadian menurut keterangan saksi/korban Sdr. Fauzan sekira±30 orang dengan menggunakan R2 dari Pok yang diduga Ormas Pemuda Pancasila dengan membawa senjata tajam serta memakai Atribut PP mendatangi Pos FBR Semut Item yang berada di TKP, kemudian langsung menyerang Ormas FBR hingga</p>	Kasus ditangani Sektro Keb. Lama

				<p>mengakibatkan Anggota FBR Semut Item berlari selanjutnya Ormas PP mengejar Anggota FBR yang berlari kearah pemukiman warga selanjutnya Pok Ormas yang diduga Pemuda Pancasila langsung merusak Kendaraan yang terpakir milik warga Jenis Toyota Kijang Kapsul dengan No. Pol B 2773 VM warnaBiru(Milik Sri LarasNingsing , Yogyakarta 12 November 1958, Islam, Perempuan, Alamat Jl. Gandaria 1 Rt 01/05 Kel. Keb. Lama Utara mengalami kerusakan pada bagian Kaca depan, belakang serta kaca depan samping kiri mengalami pecah) dan Suzuki Ertiga No. Pol B 2915 SKN dengan warna Abu-Abu (Milik Nurmawati, Jakarta 06 Maret 1979, Perempuan, Islam, Jl. Gandaria 1 Rt 01/05 Kel. Keb. Lama Utara mengalami kerusakan pada bagian kaca belakang pecah) yang dipecahkan menggunakan senjata tajam serta mengambil 2 Buah HP Merk ZTE milik Driver Gojeg yang sedang mangkal di lokasi. Menurut keteranganSaksi/Korban Sdr. Ahmad Hasanudin Saat korban tiba di pos FBR Semut Item bersama</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>dengan 4 temansekira jam 17.00 Wib datang 30 orang yg tidak dikenal dengan menggunakan atribut jaket ormas PP dengan menggunakan tutup muka/cadar langsung datang dan berteriak " matilu " dan langsung merusak Pos FBR Semut Item hingga mengakibatkan TV yang berada di Pos FBR Semut Item rusak serta menyerang korban dan teman2 korban sekitar 5 orang lebih menyerang korban dengan memukul kepala sebelah kanan korban dengan menggunakan balok kayu lalu korban tercebur kedalam kali selanjutnya korban mengalami luka pada bagian memar dikepala sebelah kanan, terkena pukulan balok kayu.</p>	
25	Sabtu 29 April 2017 pukul 14.30 wib	Pengroyo- kan dan pengania- yaan Ormas Pemuda Pancasila (PP) dan FBR	Balai Rakyat Bintaro Jl. Bintaro Permai III Rw. 09 Kel. Bintaro Pesanggrahan Depan Gardu FBR 0320 Macan Bintaro Pesanggrahan Jaksel	<p>Korban : Didi Angga Priambodo</p> <p>Saksi : M sukron</p> <p>Pada saat kejadian saksi berada di tkp sedang berkumpul di gardu sambil berbincang – bincang, saat itu ada rombongan ± 4 spm ormas PP dari DPC Cengkareng dari arah Polsek pesanggrahan ke arah Balai rakyat Bintaro yang akan menghadiri pelantikan Ketua PAC Pesanggrahan. Tiba –</p>	Kasus ditangani Sektro Pesang- grahan

				<p>tiba kelompok FBR yang berada bersama bersama saksi langsung menghadang dan memukuli secara beramai – ramai dan saski dengan beberapa warga berusaha meleraai dan menyuruh lari kelompok ormas PP yang masih tertinggal. Dan selanjutnya para pelaku langsung melarikan diri. Keterangan saksi bahwa pelaku penganiayaan yang saksi sdr. Sinyo dan sdr. Bogel merupakan anggota FBR gardu 0320 Macan Bintaro. setelah adanya kejadian tsb pihak Polsek Pesanggrahan langsung berkoordinasi dengan ormas PP yang sedang melaksanakan giat pelantikan agar menahan diri.</p>	
26	Selasa 18 April 2017 pukul 01.40 Wib	Keributan NU Banser Ansor dan FPI Jakpus	Jl. Kramat Lontar No. 95 Kel. Kramat Kec. Senen Jakpus	<p>Saksi : Uti 55 tahun</p> <p>Keributan bermula dari beredarnya informasi bahwa rumah ust. Buya Majid (Tomas setempat) yang rumahnya berdekatan dengan salah satu pendukung Paslon no. 2 (Ibu Ita) merasa terintimidasi oleh massa yang menggunakan atribut NU (Banser dan anshor yang datang ke rumah Ibu ita. Menurut keterangan ibu Ita massa tersebut hanya untuk membantu</p>	Kasus ditangani Sektro Senen

				<p>karena rumahnya didatangi dari ACTA yang menuduhnya telah melakukan politik uang dengan cara membagikan sembako. Karena merasa ketakutan kemudian Ibu Ita meminta bantuan Gp ansor. Melihat kedatangan massa yang berjumlah 100 orang beratribut banter dan anor sambil beteriak dari ACTA lari kerumah Buya Majid, kemudian beredar informasi tidak jelas yang mengakibatkan massa FPI Jakpus datang ke tkp hingga terjadi keributan. Namun dapat diredam oleh pihak Kepolisian Restri jakpus</p>	
27	Minggu 7 Mei 2017 pukul 05.20 Wib	Penyerangan Sajam ormas	Jl. Tanggul Banjir Kanal Grogol	<p>Korban : 1. Adi Mulyadi 33th 2. Untung Slamet 30th Pelaku : Dalam lidik Saksi :</p> <p>Penyerangan berawal enam anggota sebuah ormas sedang tidur di posko. Mereka terbangun kaget melihat segerombolan pemuda mengendarai motor sudah berada di depan posko. Sambil mempermainkan gas motornya, sebagian dari mereka merusak motor milik anggota ormas. Satu motor dibuang di kali. Sementara itu kawanan pria bermotor tanpa banyak bicara melakukan penyerangan terhadap</p>	Kasus ditangani Sektro Tj. Duren

				<p>keenam anggota ormas. Mendapat serangan mendadak membuat keenam orang tsb berusaha melawan menghindari sabetan samurai dan bacokan golok yang dilayangkan gerombolan bermotor ini. Sedangkan sebagian dari gerombolan pria ini merusak posko dan empat motor yang diparkir di dekat posko. Dua pria anggota ormas terkena bacokan sehingga mengalami luka parah di bagian tangan dan kakinya. Sekitar pukul 09.15 Wib muncul lagi kawanan bermotor dikarenakan belum puas melakukan penyerangan kembali. Namun aksi mereka gagal setelah berhasil dihalau puluhan aparat Kepolisian.</p>	
--	--	--	--	---	--

Sumber: Direktorat Intelkam Subdit VI Polda Metro Jaya (2018)

Menanggapi fenomena konflik yang melibatkan ormas di Jakarta, ketua umum FBR, Lutfi Hakim, tidak menampik sejumlah aksi keributan yang seringkali membawa nama FBR. Pada 30 Januari 2018 saat ditemui di kediamannya di Cakung-Jakarta Timur, Lutfi menjelaskan sebagai berikut:

“Terkait aksi kekerasan yang sering melibatkan oknum ya saya harus *tetep* melakukan pengecekan-pengecekan kebawah. Ketika saya *denger* berita itu maka saya harus cek dulu keadaannya, mungkin ada yang sesuai dengan pemberitaan, ada juga yang tidak sesuai. Cuma kan kita

nggak punya kemampuan untuk membantah itu. Tentu anggota-anggota kita bina. Saya *kalo* ditanya gimana sikap, jangankan anggota biasa, saya *nggak* segan untuk tega sama panglima FBR *kalo* buat salah mencemarkan nama baik organisasi. Artinya *kalo* ditanya ketegasan, selama ini berapa lama saya sudah *mecat* anggota. Persoalan orang anggap *gimana* ya saya *nggak* peduli, yang penting saya *tetep* lakukan pembinaan.”

Pemuda Pancasila pun demikian, melalui Yahya Abdul Habib selaku sekretaris MPW Jakarta bidang ekonomi dan pembangunan, ia tidak memungkiri stereotipe yang kurang baik tentang ormas Pemuda Pancasila di Jakarta. “Sekarang kita *udah* harus maju, paradigma sudah berubah, kita *tegesin* kalo Pemuda Pancasila itu mengedepankan otak bukan otot. Yang dulu mungkin bisa jadi seperti itu. Ke depan, pembinaan terus kita lakukan. Kita juga taat hukum, taat Pancasila, kalau memang terbukti ada anggota yang terlibat kasus ya kita dampingi proses hukumnya, *kayak* semacam advokasi, lalu kita bina.” (Yahya Abdul Habib, 2018)

FPI juga senada dengan dua ormas besar tersebut, tidak memungkiri bahwa seringkali terlibat aksi konflik di lapangan. Namun sedikit berbeda dengan PP dan FBR yang konflik-konfliknya disebabkan sentimen personal atau persoalan ekonomi di akar rumput. FPI lebih merupakan ormas yang terkenal cukup keras dalam aksi memerangi kemaksiatan seperti prostitusi dan hiburan malam. Ketika 2 Februari 2018 peneliti mewawancarai Awit Masyhuri (Sekjen DPP FPI), Awit menjelaskan bahwa dirinya tidak menolak pernyataan jika ormas FPI seringkali terlibat konflik dan kekerasan.

“Kita berharap sih *nggak* ada kekerasan keributan, siapa yang mau ada keributan. Kita inginnya *safety* aman tenang tapi berhasil. *Nggak* ada perang kekerasan. Kita bukan orang serampangan amburadul, ada prosedur juang. Tapi

kalo pada akhirnya harus ada bentrok ya itu namanya risiko, risiko perjuangan. Sudah dibuktikan *kok* berapa banyak anggota yang dipolisikan. Tentu DPP FPI tidak menginginkan adanya benturan, kita *pengen* aman tenang berhasil. Tapi *kalo* memang caranya harus seperti itu (kekerasan) ya apa boleh buat. Ketika tempat maksiat itu bisa ditutup dengan cara yang lembut ya wajib lembut...”

4.2.2 Giat Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta dalam Pengelolaan Ormas dan Penanganan Konflik Antar Ormas di Jakarta (2014-2017)

Berbicara mengenai fenomena konflik ormas yang acapkali terjadi di Jakarta, yang menjadi kekhasan penelitian ini adalah bagaimanakah peran pemerintah provinsi DKI Jakarta pada level struktural dalam pengelolaan ormas di Jakarta. Sehingga penelitian ini berangkat dari *standing point* regulasi dan implementasi tata kelola ormas di DKI Jakarta, sebagai muara dari persoalan ormas. Adalah Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur lembaga pemerintah daerah yang menjalankan UU 23 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, yang secara khusus memang berwenang membina ormas di Jakarta. Tata pelaksanaan Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta mengacu pada Pergub DKI Jakarta Nomor 258 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Dalam pengelolaan dinamika ormas, terdapat subbidang Bakesbangpol khusus di tingkat provinsi DKI Jakarta yakni Subbidang Ormas. Subbidang tersebut terdiri atas 3 orang, seorang kepala saat ini dijabat oleh Eliazer Hutapea, S.E., M.M. dibantu oleh dua orang staf. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Eliazer menjelaskan sejumlah acuan dasar untuk selanjutnya diturunkan sebagai rencana giat teknis tahunan. Sebagaimana dipaparkan oleh Eliazer dalam wawancara dengan

peneliti di Kantor Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta (10 Januari 2018):

“Kita bekerja mengacu pada UU 23 Tahun 2014, selain itu tentunya mengacu pada Direktorat Jenderal Pemerintahan dan Politik Kemendagri. Sebagai landasan karena kita subbid ormas, maka acuannya pun undang-undang ormas yah Nomor 16 Tahun 2017. Ada juga Permendagri Tahun 2017 nomor 56 tentang pengawasan ormas, 57 tentang pendataan dan sistem informasi ormas, 58 tentang kerjasama ormas. Subbid ormas ini ada di bawah bidang ketahanan Kesbangpol provinsi, tapi kalo ketahanan itu *kan* luas ya cakupannya, *nah* subbid ormas ini memang spesial menangani ormas. Kalo ormas di DKI ada masalah, atau harus ada hubungan ya hubungannya dengan kami ini.”

Eliazer menambahkan, bahwa dinamika ormas di Jakarta memang luar biasa. Selain karena jumlahnya yang sangat banyak yakni pada tahun 2015 saja tercatat 1.157 ormas di Surat Keterangan Terdaftar (SKT), ormas di Jakarta juga sangat beragam latar belakangnya. Mulai dari basis agama, pemuda, profesi, suku, dan sebagainya. Dalam mengelola hal tersebut, Eliazer selaku Kepala Subbidang Ormas Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta memimpin sejumlah kegiatan mulai dari rapat, silaturahmi dengan para petinggi ormas, hingga giat pemberdayaan. Eliazer menjelaskan:

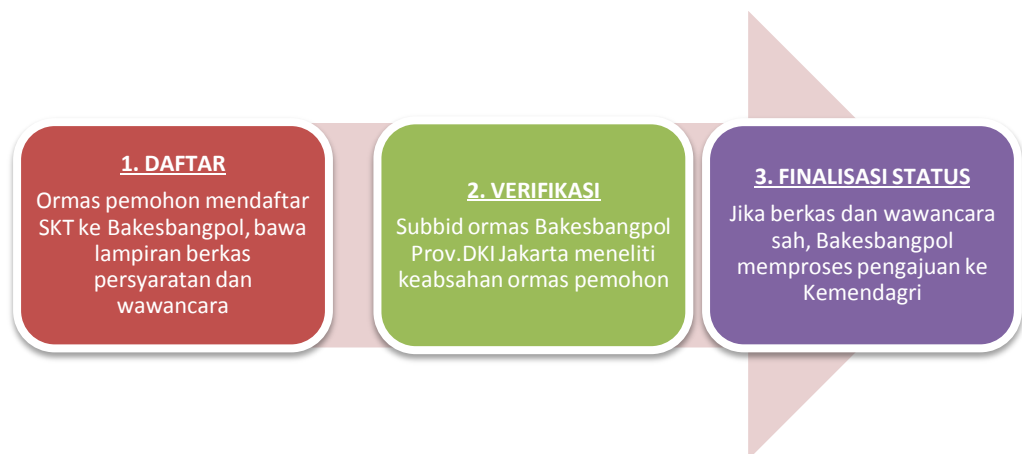
“Kesbang kan koordinator, jadi kita banyaknya kerjasama dengan instansi dan elemen lain. Tantangannya ya tentu karena ormas di Jakarta sangat banyak yah, jadi pendekatan yang saya lakukan juga harus pendekatan simpatik. Kalo tegas gitu *nggak* akan bisa. Itu yang mungkin jadi ciri khas Kesbangpol. Harus bisa merangkul semua.”

Secara substansial, sasaran Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta adalah ormas terdaftar dengan baik dan benar, kemudian proker ormas harus aktif dan giat, serta ormas-ormas di Jakarta diberdayakan melalui penguatan kapasitas organisasi (Eliazer,

2018). Kemudian secara prosedural, berikut adalah giat wewenang tugas dan fungsi Subbidang Ormas Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta yang terdiri atas pendaftaran, pemberdayaan, penyelesaian sengketa, dan pengawasan ormas.

a. Pendaftaran SKT Ormas

Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta dengan 5 wilayah kota, sesuai Permendagri 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan melakukan pelayanan Pendaftaran SKT (Surat Keterangan Terdaftar) dan meneliti keabsahan data. Setelah data ormas pemohon dianggap sah, maka Bakesbangpol kemudian menyampaikan surat permohonan kepada Direktur Ormas Dirjen Polpum Kemendagri untuk diterbitkan SKT.



Gambar 4.2: Alur SKT Ormas di Provinsi DKI Jakarta

Sumber: Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta, 2018

b. Pemberdayaan ormas



Gambar 4.3: Surat Undangan Peserta Kegiatan Peningkatan Peran Ormas-ormas di Jakarta

Sumber: Subbidang Ormas Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta, 2018

Pemberdayaan ormas dilakukan mengingat jumlah ormas di Jakarta yang sangat banyak dan beragam. Keberadaan ormas ini jika tidak dikuatkan dapat menjadi potensi permasalahan, oleh

karenanya adalah tugas penting Bakesbangpol sebagai lembaga pemerintah yang menguatkan kapasitas ormas. Program kegiatan Bakesbangpol mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan tidak terlepas dan selalu melibatkan pengurus pejabat ormas. Demikian juga ketika ormas dalam pelaksanaan program kegiatannya, Bakesbangpol juga diajak bersama-sama dan membantu memfasilitasinya di samping sederet hal lain yang mendukung pelaksanaan program. Menurut keterangan Eliazer (31 Januari 2018), Subbid Ormas Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta yang dipimpinnya rutin menyelenggarakan peningkatan peran ormas dalam frekuensi 8 kali setahun. Program dalam bentuk *workshop*, sosialisasi dan *rembugan* ini mengundang sejumlah petinggi ormas di Jakarta, dengan harapan ormas tersebut selain dapat eksis dan kuat, tetapi juga dapat beriringan dengan pemerintah untuk memajukan kota Jakarta. *Workshop* ini diisi dengan sejumlah konten mulai dari bela negara, ideologi wawasan kebangsaan, *sharing* antar ormas dan instansi, dan seterusnya.

Pemberdayaan juga dilakukan melalui program bantuan sosial (bansos) dan hibah yang bersumber dari APBD. Bansos tersebut utamanya diharapkan menyasar ormas yang aktif, kontributif, dan mandiri tetapi kekurangan dana dalam melaksanakan kegiatannya. Dana tersebut pun tidak lantas *ujug-ujug* dikeluarkan, melainkan harus melewati serangkaian proses oleh TAPD (Tim Administrasi Pemerintah Daerah) dengan kesesuaian serta kualitas ormas (Eliazer, 2018).

Dalam implementasi kegiatan pemberdayaan ormas, Subbidang Ormas Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta mengacu pada Rencana Kerja (Renja) yang diterbitkan setiap tahun. Subbidang Ormas juga tidak bekerja sendirian, tetapi juga dengan kerjasama antarbidang dan subbidang lainnya di Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta. Rencana kerja tersebut pada level teknis

dikoordinasikan tingkat provinsi untuk selanjutnya dieksekusi secara menyebar di tingkat Kesbangpol kota di Jakarta.

c. Penyelesaian sengketa ormas

Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta sebagai payung pembina ormas di Jakarta memiliki kapasitas untuk turut serta menyelesaikan sengketa ormas. Menurut Eliazer, tugas inti Subbid Ormas Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta dalam fungsi penyelesaian sengketa adalah mendudukan persoalan benang merah ormas, sejarah ormas, dan kepentingan ormas tersebut. Setelah persoalan didudukan, posisi Bakesbangpol hanya menjalankan fasilitasi mediasi dan kemudian mengembalikan keputusan sengketa pada ormas yang bersangkutan. Sebab, panglima tertinggi internal ormas adalah AD/ART ormas itu sendiri. Kemudian secara eksternal, jika terjadi sengketa antar ormas yang sifatnya kasus hukum maka yang berperan adalah pengadilan.

d. Pengawasan Ormas

Merujuk pada UU 16 Tahun 2017 yang menetapkan Perppu No.2 Tahun 2017 tentang ormas, Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta kini semakin mengemban tugas besar dalam pengawasan ormas di Jakarta. Undang-undang yang baru ini memiliki perbedaan signifikan dari yang sebelumnya, yakni pada perubahan mekanisme pemberian peringatan dan sanksi kepada ormas yang melakukan pelanggaran. Peraturan yang baru ini lebih ketat, bahwa jika dalam jangka waktu yang lebih pendek yakni 30 hari ormas yang bersangkutan mengulang pelanggaran kembali maka pemerintah berhak memberhentikan operasional ormas tersebut. Di sinilah fungsi Bakesbangpol melaksanakan tanggung jawab sebagai gerbang SKT ormas, untuk terus memantau perkembangan dan pergerakan ormas, utamanya kini ormas-ormas yang terindikasi anti Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan ini, Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan segenap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya mulai dari tingkat kota, kecamatan, hingga kelurahan. Fungsi intelijen dan deteksi dini dijalankan melalui koordinasi dengan SKPD terkait dan Kominda (Komunitas Intelijen Daerah) melalui forum silaturahmi yang rutin dilaksanakan beberapa kali dalam setahun.



Gambar 4.4: Situasi rapat *monitoring* ormas di Kantor Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta

Sumber: Dokumentasi peneliti, 2018

Pada kasus permasalahan ormas, khususnya pada konflik antar ormas sebagai implikasi pesatnya ormas di Jakarta, terdapat subbid lain di Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta yang berurusan wewenang untuk turut menanganinya yakni Subbid Penanganan Konflik Sosial yang berada di bawah bidang Kewaspadaan. Subbid tersebut saat ini dipimpin oleh Sony Triwibawa, dibantu oleh dua staf. Sony menjelaskan dalam wawancara dengan peneliti di Kantor Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta (23 Januari 2018) sebagai berikut:

“Subbid ini memang mengkoordinasi penanganan konflik, kita bentuk yang namanya TTPKS (Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial). Tim terpadu ini isinya banyak elemen, *nggak* hanya dari Kesbang tetapi melibatkan TNI, Kepolisian, dan sebagainya. Pada intinya *sih* karena subbid kita ini di tingkat propinsi, kalau penanganan mediasi langsung *sih* kita jarang, karena mediasi di Kesbangpol Jakarta ini biasanya mediasi sektoral. Jadi *kalo* ada masalah konflik, salah satunya seperti konflik ormas yang Mbak katakan *nih* ya, kita mediasi mulai dari kelurahan, kecamatan, biasanya paling tinggi *sampe* kota. Tergantung juga masalahnya *gimana*. *Kalo* sudah terkategori kriminal//tindak pidana, berarti polisi yang *nanganin*. Kembali ke mediasi tadi, *kalo* tingkat propinsi sebetulnya jarang sekali, bisa dihitung jari. Biasanya *kalo* udah *selese* di kota ya *udah*. *Nah kalo* di tingkat kota juga *nggak* bisa selesai, baru dibawa ke subbid di tingkat propinsi ini.”

Selain tim terpadu penanganan konflik sosial, terdapat juga *Tim Monitoring* Ipoleksosbud, fungsinya memantau dan mengantisipasi sejumlah aksi massa yang utamanya sering melibatkan ormas, seperti tawuran dan unjuk rasa. Menurut Sony, tawuran di Jakarta secara umum ada dua jenis, yakni tawuran permanen (di wilayah yang memang penduduknya suka tawuran), dan tawuran sporadis. Dalam masalah bentrok/tawuran yang sering melibatkan atribut ormas, Sony menjelaskan bahwa pihak Kesbangpol pun nyatanya kesulitan menggolongkan apakah tawuran tersebut adalah bentuk konflik antar ormas sesungguhnya,

atau sebenarnya konflik pribadi saja dengan penyalahgunaan atribut ormas. Sehingga dalam pelaksanaan *monitoring* dan penanganan konflik, langkah pertama yang dilakukan Subbid Penanganan Konflik Sosial Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta adalah verifikasi bukti-bukti lewat instansi terkait, misalnya kepolisian dan RT/RW, Lurah, Camat di wilayah yang disinyalir menjadi lokasi bentrok antar ormas. Verifikasi tersebut dilakukan untuk kemudian dilakukan rekapitulasi pada indeks kerawanan konflik, dan peta persebaran wilayah konflik di lima kotamadya Jakarta. Rekapitulasi ini dirilis melalui lima indikator utama, yakni indikator kemiskinan, kepadatan penduduk, kekumuhan, banyaknya tindak pidana dan banyak kejadian tawuran (Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta, 2015). Berikut ini adalah beberapa contoh rekapitulasi data dari Subbidang Penanganan Konflik Sosial Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta.

Persebaran Wilayah Pengamatan Rawan Konflik di Jakarta

No	Wilayah	Kecamatan terpilih	Jumlah RW	Jumlah penduduk (jiwa)
1	Jakarta Selatan	Kec. Kebayoran Baru	73	148.527
		Kec. Tebet	79	229.824
		Kec. Mampang Prapatan	38	147.694
		Kec. Setia Budi	50	111.506
2	Jakarta Timur	Kec. Kramat Jati	65	282.347
		Kec. Jatinegara	90	307.548
		Kec. Matraman	62	181.368
3	Jakarta Barat	Kec. Grogol Petamburan	73	226.275
		Kec. Cengkareng	84	495.850
		Kec. Tambora	96	267.523
4	Jakarta Pusat	Kec. Johar Baru	40	131.896
		Kec. Gambir	45	99.329
5	Jakarta Utara	Kec. Penjaringan	70	296.062
		Kec. Pademangan	34	159.984
		Kec. Koja	82	310.105
		Kec. Cilincing	87	382.265
	Jumlah	16 kecamatan		

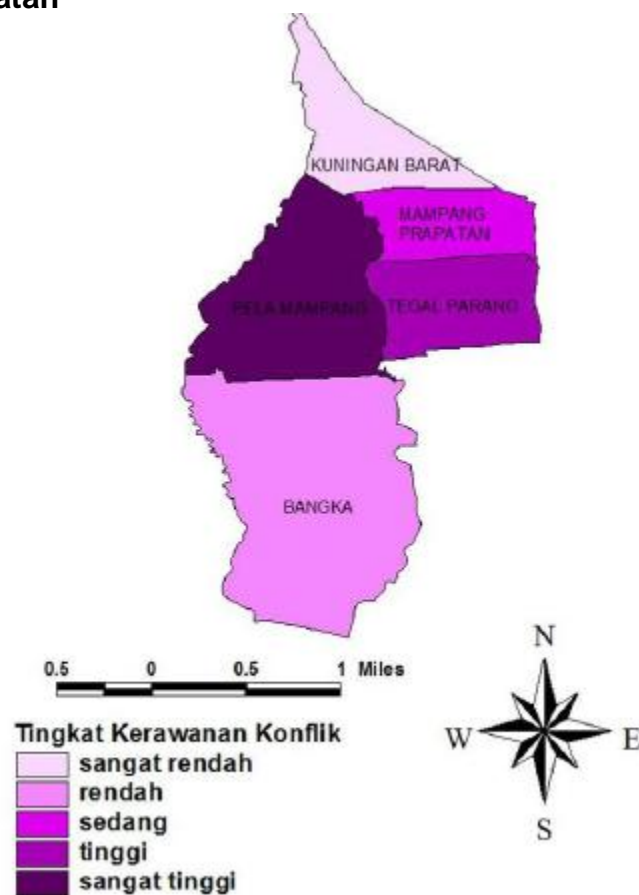
Sumber: Peta Rawan Konflik Bakesbangpol DKI Jakarta, 2015

Indeks Rawan Konflik di Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan

Kec. Setiabudi	Indeks Ruta Miskin	Indeks Kepadatan Penduduk	Indeks RW Kumuh	Indeks Tindak Pidana	Indeks Tawuran	Indeks Rawan Konflik
Karet Semanggi	59.30	4.40	6.57	100	0.03	34.06
Kuningan timur	70.32	4.56	5.62	46.64	0.03	25.43
Karet Kuningan	37.49	17.70	8.24	82.36	0.01	29.16
Karet	15.07	23.14	7.58	82.06	7.13	27.00
Menteng atas	11.97	67.52	7.02	58.64	2.36	29.50
Pasar Manggis	43.56	75.89	44.67	53.09	8.31	45.10
Guntur	38.97	12.25	8.32	50.23	10.88	24.13
Setiabudi	9.43	7.85	7.57	82.06	7.17	22.82

Sumber: Peta Rawan Konflik Bakesbangpol DKI Jakarta, 2015

Peta Wilayah Rawan Konflik di Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan



Sumber: Peta Rawan Konflik Bakesbangpol DKI Jakarta, 2015

Sama halnya dengan Subbidang Ormas, Subbidang Penanganan Konflik Sosial dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pun bekerjasama dengan sejumlah mitra, seperti Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Tidak hanya itu, Subbid Penanganan Konflik Sosial juga menggandeng institusi akademik, seperti misalnya kerjasama dengan Universitas Indonesia dalam pembuatan Peta Kawasan Rawan Konflik DKI Jakarta Tahun 2015.

Meski terdapat dua subbidang yang berwenang langsung atas pengelolaan ormas dan penanganan konflik antar ormas; pada perencanaan dan praktik penyelenggaraan programnya, Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta merupakan lembaga integral yang hadir secara utuh melalui koordinasi berbagai bidang-bidang di dalamnya, termasuk ketika menghadapi kompleksitas konflik antar ormas di Jakarta. Sebab persoalan kesatuan bangsa dan politik tidak dapat dipecah-pecah porsinya begitu saja, sehingga dalam menanganinya pun sejumlah kegiatan bidang-bidang di Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta saling berkaitan, saling membawa implikasi.

Tabel 4.2: Rekapitulasi Kegiatan Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014 Terkait Pengelolaan Ormas dan Manajemen Konflik Antar Ormas di Jakarta

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Forum Silaturahmi Ormas Etnis, Ormas Keagamaan dan Para Tokoh Masyarakat dengan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta	299.801.380
2	Peningkatan sinergitas ormas dan LSM	246.399.905

	dalam pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa	
3	Peningkatan Peran Ormas Keagamaan dalam Menciptakan Kerukunan Umat Beragama dalam Memperkokoh NKRI	399.113.035
4	Pembangunan Karakter Pemuda Jakarta yang berwawasan Kebangsaan bagi OKP Kota Adm. Jakarta Barat	100.000.000
5	Peningkatan semangat kebersamaan dalam kebhinnekaan antar warga DKI Jakarta	300.000.000
6	Sosialisasi Implementasi Kebebasan Berserikat dan Mengeluarkan Pendapat	246.193.390
7	Penguatan 4 pilar kebangsaan dalam rangka pencegahan konflik di masyarakat	848.928.065
8	Peningkatan Pemahaman Elemen Masyarakat Terhadap Etika, Moral dan Budaya Politik Pancasila	291.891.065
9	Peningkatan Karakter <i>Building</i> bagi Pengurus Ormas / LSM	1.499.889.400
10	Pemantauan Ipoleksosbud	199.707.000
11	Penyempurnaan Peta Rawan Konflik	99.994.000
12	Fasilitasi dalam Rangka Menciptakan Jakarta Yang Kondusif	2.600.000.000
13	Pelaksanaan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)	498.630.000
14	Pelaksanaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	396.936.400
15	Diskusi Sosial di Kawasan Kumuh dan Rumah Vertikal	249.905.120
16	Peningkatan Kapasitas Intelijen Dasar	403.702.148
17	Peningkatan Pemahaman Sistem Deteksi	975.946.020

	Dini	
18	Kajian Strategi Penanggulangan Konflik di DKI Jakarta	98.125.500
19	Dialog Interaktif Pencegahan Aksi Unjuk Rasa Anarkis di DKI Jakarta	899.800.890
20	Sarasehan Isu Politik yang Berdampak terhadap Konflik Horizontal	899.679.240
21	Pelatihan Managemen Konflik bagi Ormas dan OKP	299.993.830
22	Penguatan peran ormas dan LSM sebagai mitra pemerintah dalam menciptakan situasi kondusif	249.992.690
23	Sosialisasi Kesepakatan Bersama tentang Penyelesaian Perselisihan Secara Damai	298.023.830
24	Penyelesaian Konflik Sosial Bernuansa SARA	298.815.800
25	Terlaksananya Evaluasi Rencana Aksi Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2014 Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	297.643.500
26	Pelatihan penanganan konflik sosial dalam penegakan demokrasi bagi ormas di DKI Jakarta	449.205.080
27	Sosialisasi Warga Jakarta tentang Kehidupan Yang Bermoral dan Beretika Dalam Pencegahan Konflik	900.000.000
28	Pencegahan konflik horisontal bagi ormas dan tokoh masyarakat	300.000.000
29	Pencegahan tawuran warga di daerah rawan konflik	300.000.000
30	Pendataan Ulang&Verifikasi Ormas dan LSM	99.038.400

31	Penguatan Manajemen Ormas dan LSM	248.197.690
32	Peningkatan Kemitraan dengan Ormas dan LSM	550.000.000
33	Forum Komunikasi LSM/ORMAS dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta	285.289.200
34	Peningkatan pemahaman pelayanan publik di bidang Kesbangpol bagi organisasi kemasyarakatan	400.000.000
35	Peningkatan pemahaman dan implementasi UU No.17 Tahun 2013 bagi Pengurus Ormas dan LSM	250.000.000

Sumber: Subbagian Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta, 2018 (*display data* diolah peneliti)

Tabel 4.3: Rekapitulasi Kegiatan Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 Terkait Pengelolaan Ormas dan Manajemen Konflik Antar Ormas di Jakarta

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Fasilitasi Pemuda dalam Rangka Peningkatan Seni dan Budaya Lokal di Provinsi DKI Jakarta	199.443.200
2	Pendataan Ulang dan Verifikasi Ormas dan LSM	46.300.900
3	Peningkatan Kemampuan Kemandirian Ormas dan LSM	199.443.200
4	Peningkatan Kerukunan Antar Umat Beragama dan Antar Kelompok Suku/Etnis	149.582.400
5	Peningkatan Penanganan Kesenjangan	199.443.200

	Perekonomian di Provinsi DKI Jakarta	
6	Sosialisasi Penanganan Konflik Sosial Bagi Masyarakat	99.999.700
7	Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial	84.543.000
8	Pelaksanaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	199.988.400
9	Peningkatan Kapasitas Pemantauan Situasi dan Kondisi Daerah	99.999.400
10	Peningkatan Pemahaman Sistem Deteksi Dini	149.999.550
11	Sarasehan Isu Politik Yang Berdampak Terhadap Konflik Horizontal	99.999.100
12	Fasilitasi dalam Rangka Menciptakan Jakarta yang Kondusif	1.736.200.000

Sumber: Subbagian Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta, 2018 (*display data* diolah peneliti)

Tabel 4.4: Rekapitulasi Kegiatan Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 Terkait Pengelolaan Ormas dan Manajemen Konflik Antar Ormas di Jakarta

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Dialog Interaktif Pemantapan Wawasan Kebangsaan Bagi Ormas Etnis dan Ormas Keagamaan	212.585.800
2	Forum Silaturahmi Pimpinan Daerah Dengan Pengurus Organisasi Kemasyarakatan	121.477.600
3	Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pembangunan	194.408.400
4	Pendataan dan Direktori Organisasi	105.589.800

	Kemasyarakatan	
5	Peningkatan Pemahaman Sistem Deteksi Dini	198.104.000
6	Pemantauan IPOLEKSOSBUD	181.623.600
7	Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	207.772.000
8	Pelaksanaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	349.506.000
9	Dialog Interaktif Penanganan Konflik Sosial Bagi Masyarakat di DKI Jakarta	118.997.000
10	Cipta Kondisi Dalam Rangka Meningkatkan Jakarta yang Kondusif	2.680.000.000
11	<i>Monitoring</i> Ketahanan Ekonomi Masyarakat di Provinsi DKI Jakarta	73.642.800
12	Forum Dialog Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Masyarakat Jakarta	139.257.000

Sumber: Subbagian Perencanaan dan Anggaran - Sekretariat Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta, 2018 (*display data* diolah peneliti)

Tabel 4.5: Rekapitulasi Kegiatan Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 Terkait Pengelolaan Ormas dan Manajemen Konflik Antar Ormas di Jakarta

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp).
1	Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi DKI Jakarta	234.186.000
2	Peningkatan Pemahaman Sistem Deteksi Dini di Provinsi DKI Jakarta	115.740.000
3	Cipta Kondisi Dalam Rangka Meningkatkan Jakarta Yang Kondusif	750.000.000
4	Dialog Interaktif Penanganan Konflik	129.140.000

	Sosial bagi Masyarakat di DKI Jakarta	
5	Pelaksanaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	850.140.000
6	Dialog Interaktif Pencegahan Tawuran	115.740.000
7	Pemantauan IPOLEKSOSBUD	132.000.000
8	Penyempurnaan Peta Kawasan Kerawanan Konflik di Provinsi DKI Jakarta	65.800.000
9	Peningkatan Ketahanan Ekonomi	206.624.000
10	<i>Monitoring</i> Ketahanan Ekonomi Masyarakat di Provinsi DKI Jakarta	67.570.800
11	Penguatan Organisasi Kemasyarakatan	206.624.000
12	Peningkatan Wawasan Kebangsaan	269.954.400

Sumber: Subbagian Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta, 2018 (*display data* diolah peneliti)

4.2.3 Koordinasi Eksternal Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta dalam Manajemen Konflik Antar Ormas di Jakarta (2014-2017)

4.2.3.1 Koordinasi dengan Unsur Pemerintah

Dalam menjalankan tugas dan fungsi manajemen konflik antar ormas di Jakarta, Bakesbangpol berperan sebagai koordinator dengan elemen eksternal lain seperti unsur pemerintah terkait, misalnya para pimpinan daerah mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga kotamadya. Selain itu, utamanya pada aspek pemantauan dan penegakan kondusifitas ibukota, koordinasi Bakesbangpol dilakukan bersama aparat Satpol PP, TNI, dan Polri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum, Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta telah melakukan

koordinasi dengan segenap unsur pemerintah tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh Budhy Novian (Kepala Bidang Penegakan dan Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi DKI Jakarta) ketika diwawancarai peneliti di Balai Kota DKI Jakarta, 4 Januari 2018:

“Hubungan kita dengan Kesbangpol selama ini baik. Mulai dari koordinasi, kita sering diundang forum rapat silaturahmi. Forum itu rutin. *Kalo* Satpol PP sendiri kan intinya bertugas berdasarkan amanat Permendagri 54 Tahun 2011, UU 6 Tahun 2010, UU 23 Tahun 2014. Fungsi Satpol PP adalah menegakkan perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. *Kalo* terkait pembinaan ormas itu *yah*, itu memang intinya wewenang ada pada Kesbangpol. Kita hanya bantu saja. Kita ada yang namanya pasukan pengendali massa. Kemudian kegiatan rutin kita ada namanya piket tawuran, di situ kita kerjasama dengan Polsek untuk patroli terus setiap hari, *sampe* malam. Pernah di beberapa titik kita adakan jam malam. *Nah* kadang susah nih *kalo* tiba-tiba ada bentrok setelah patroli selesai, mereka (ormas) tawuran *udah* tengah malam. *Kalo* ormas *sih* sepengetahuan saya sekarang jarang bentrok-bentrok lagi ya, ada mungkin tapi dulu. Itu pun saya rasa oknum saja. Sekarang paling yang kita pantau *kalo* ormas itu misalnya seperti dia buka majelis, pengajian yang *nutup* jalan atau berpotensi tidak tertib, *nah* disitu kita upayakan tertibkan. Ditertibkannya juga *nggak* langsung *gitu*, kita monitor terus, apakah ada laporan dari warga, kita kasih peringatan, kalo *nggak* ada izin dan sudah diingatkan tidak tertib juga baru kita lakukan penindakan.”

Hal senada juga dikemukakan oleh Aldin Hadi, M.Si.(Han) selaku Staf Intelijen Kodam Jaya. Hubungan Kodam Jaya dengan Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta hingga kini terjalin dalam komunikasi yang baik, salah satunya dengan dilibatkannya Kodam Jaya dalam Unit Kerja Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) di Kantor Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta. Dikatakan Aldin ketika

diwawancarai peneliti di Cililitan, Jakarta Timur (16 Januari 2018):

“Selama ini hubungan kita (dengan Kesbangpol) baik. Kita sering ke Balai Kota, ikut unit PPWK, kita aktif juga *nih* saya ada grup WA-nya. *Kalo* di Kodam sendiri strategi pembinaan ormasnya itu kita adakan lewat pembinaan teritorial, bentuknya sosialisasi, silaturahmi, seminar. Itu adanya di staf teritorial. Mulai dari lingkup terkecil, kita libatkan Koramil, Camat, Polsek. Ada juga yang namanya Babinsa (Bintara Pembina Desa), walau kadang memang berat juga karena 1 babinsa mendampingi berapa orang ya *kan*. *Kalo* tentang konflik ormas itu ya, dalam pandangan saya *sebenarnya* karena masalah-masalah sepele. *Personal problem*. Ormas kan intinya keberadaannya harus kita dukung, selama tidak *crash* dengan Pancasila dan UUD 1945.”

Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta juga selama ini telah ini bekerjasama dengan unsur Polda Metro Jaya, khususnya saat menangani konflik yang melibatkan antar ormas, Polsek-Polres setempat dikerahkan sebagai garda terdepan pasca konflik terjadi. Ketika konflik antar ormas sudah pecah, maka menjadi wewenang Polsek-Polres setempat untuk menindak (Sony Triwibawa, 2018). Menurut Sony, Polda Metro Jaya pun mendelegasikan anggota satuannya ke dalam Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, serta Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) di bawah koordinasi Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta. Ditambah keterangan Juventus Pasaribu, S.H., Staf Intelijen dan Keamanan Polda Metro Jaya, ketika diwawancarai di Polda Metro Jaya (23 Januari 2018):

“Bakesbangpol perannya penting sebagai koordinator pembinaan ormas. Hanya saja memang yang terjadi di lapangan pada oknum anggota ormas adalah kurangnya komunikasi, saling dendam *personal*, dan urusan yang sebenarnya sehari-hari, misalnya

rebutan lapak lalu jadi konflik. Bakesbangpol sudah bekerja dengan baik, tetapi memang harus dilakukan langkah lanjutan dengan tidak sebatas koordinasi saja tetapi perlu dibentuk satuan tugas khusus (satgasus) yang berkesinambungan, tidak hanya temporer ketika konflik antar ormas sudah pecah.”

4.2.3.2 Koordinasi dengan PP, FPI, dan FBR

Selain dengan unsur pemerintah, Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta juga melakukan koordinasi dengan sejumlah ormas di Jakarta. Target agar ormas terdata sesuai SKT tentunya dapat berjalan melalui koordinasi dengan ormas. Koordinasi dilakukan melalui forum silaturahmi dan komunikasi intens sehari-hari melalui grup *messenger* ponsel, yaitu *WhatsApp*. Namun demikian, dengan begitu banyaknya ormas di Jakarta yang berbeda-beda karakternya, Bakesbangpol tidak lantas dapat berkoordinasi dengan semua ormas dengan mudah. Ada juga ormas yang terkesan jauh dari pemerintah lantaran *gap* yang dibangun (Eliazer, 2018).

Ormas Pemuda Pancasila MPW DKI Jakarta adalah salah satu ormas yang cukup dekat dengan Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta. Relasi tersebut tidak sebatas koordinasi formal, tetapi juga relasi informal antara pejabat Bakesbangpol dengan petinggi di Dewan Pengurus Pemuda Pancasila berjalan baik. Begitu pun ketika Pemuda Pancasila mengadakan kegiatan-kegiatan, maka Bakesbangpol turut diundang (Yahya Abdul Habib, 2018). Namun demikian, menurut Yahya, koordinasi ini belum optimal. Ia mengungkapkan bahwa koordinasi harus dimaksimalkan agar konsep Pancasila bisa tercermin dari ormas-ormas di Jakarta, tidak hanya sekadar intensitas komunikasi, rapat, atau sosialisasi; tetapi juga bisa berupa

focus group discussion (FGD) dengan tema ideologis, bersama dengan ormas-ormas lainnya. Jika ini dilakukan, maka hubungan binaan antar ormas dapat menjadi lebih baik (Yahya, 2018).

Selain Pemuda Pancasila, penelitian ini turut menggali sejauh mana koordinasi Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta dengan dua ormas besar lainnya, yakni FBR dan FPI. Ketika dimintai tanggapan mengenai koordinasi tersebut (30 Januari 2018), Ketua Umum FBR Lutfi Hakim, M.A menjelaskan sebagai berikut:

“*Kalo* secara formal kita *nggak* kerjasama dengan Pemda (Kesbangpol). Saya lebih menitikberatkan pada kemampuan swadaya. Sehingga kita tidak menggantungkan pada pemerintah. Yang namanya budaya *kan* tidak bisa dikalkulasi matematik. Mungkin pada titik-titik tertentu kita bersinergi... kadang insidental *kalo* ada pelatihan, ya kita ikut. Kadang ada pembinaan, kita ikutsertakan *temen-temen*. Pemda tetap memandang FBR stereotip sebagaimana pemberitaan-pemberitaan di media. Sehingga mereka *kalo* dilihat hampir banyak memandang FBR dalam tanda kutip miring. *Kalo* mau nata ayo, jangan *cuma* jadikan kita kambing hitam karena ketidakmampuan memberdayakan masyarakat. Seharusnya mereka *kan* punya anggaran, setidaknya setiap mengeluarkan itu harus ada silabus-silabus yang jelas bukan hanya sekedar pelatihan, *kalo* ada silabus yang runtut dan parameter yang jelas hasilnya *kan* bisa *diliat*.”

FBR sebagai ormas yang telah hadir 17 tahun di Jakarta sebagai representasi Betawi, nyatanya tidak memungkiri bahwa memang tidak lantas serta-merta akrab dengan Pemda, dalam hal ini Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta. Relasi yang justru terbangun adalah dengan pihak Kepolisian (Lutfi Hakim, 2018).

Sedangkan FPI, dalam hal ini disuarakan oleh Awit Masyhuri selaku Sekjen DPP FPI, menyatakan bahwa koordinasi dengan Pemda (dalam hal ini Bakesbangpol) bergantung pada situasi pimpinan daerah tersebut. Awit memaparkan:

“...*kalo* pemimpin daerahnya baik, khususnya ke FPI *yaa*, ya ada komunikasi, *nggak* ada masalah, FPI siap datang. Cuma ya itu tadi, tidak ada pemberitaan. Sepi pemberitaan. FPI tidak pernah menutup pintu kepada instansi manapun yang ingin ada komunikasi. FPI itu terbuka dan kita berhubungan dengan instansi. Hubungan itu memang wajib, harus. *Kalo* di DPP urusannya sama tingkat negara *yah* kayak DPR, Istana. *Kalo* DPD sama pemda, Gubernur. Sekali lagi, itu tergantung siapa pemimpin daerahnya. Mau *nggak* komunikasi sama kita.”

4.2.4 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Tupoksi Bakesbangpol dalam Manajemen Konflik Antar Ormas di Jakarta (2014-2017)

Dinamika ormas di Jakarta yang jumlahnya sangat banyak, beragam, dan sering juga terlibat dalam gesekan, membuat Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta mengemban tugas yang besar dalam koordinasi, pembinaan, dan pemberdayaan atas ormas tersebut. Selaku Kepala Subbidang Ormas Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta, Eliazer Hutapea menjelaskan faktor pendukung yakni kerjasama Bakesbangpol dengan sejumlah SKPD, pimpinan daerah, dan aparat keamanan. Dikatakan Eliazer:

“...tentunya kita *nggak* bisa kerja *sendirian*, pencapaian kita itu karena kerjasama yang luar biasa dari *temen-temen* ormas, Forkopimda, polisi, TNI, dan seterusnya. Misalnya aksi 212 *kemaren* kan bisa aman damai begitu, padahal berapa banyak massa ormas yang turun, itu semua kerja keras dari semua pihak.”

Selain itu, faktor pendukung lainnya adalah landasan regulasi ormas yang kini semakin diperketat, sehingga mau tidak mau ormas di Jakarta harus mampu menguatkan dirinya sesuai Pancasila dan UUD 1945 (Eliazer, 2018). Pada kapasitas organisasi, dapat disebut juga faktor pendukung kekhasan Provinsi DKI Jakarta sebagai daerah sentral, yakni pada tingkat kesejahteraan pegawai yang tergolong tinggi. Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta memiliki keunggulan dalam hal tersebut, maka ini dapat menjadi faktor pendukung dari implementasi tugas pokok dan fungsi pada giat teknis pelaksanaan.

Sedangkan pada segi faktor penghambat, Bakesbangpol DKI Jakarta menemui banyak tantangan di tahap pengelolaan, pemberdayaan, dan pengawasan ormas. Pada tahap pengelolaan secara struktural organisasi kerja, Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta terkendala oleh komposisi tim yang berjumlah sedikit dan belum maksimal. Meskipun komposisi tersebut mengacu pada Undang-undang Analisis Jabatan; tetapi kapasitas tugas dan persoalan yang menjadi wewenang Bakesbangpol begitu besar, sehingga komposisi yang ada kini harus bekerja ekstra. Pada Subbidang Ormas hanya terdiri dari 3 orang, begitupun Subbidang Pemantauan dan Penanganan Konflik Sosial yang juga hanya terdiri dari 3 orang. Ini menyebabkan mereka bekerja keras dengan tanggung jawab yang begitu besar. “Wah kita *mah* bukan *kewalahan* lagi *kayaknya...* Babak belur,” tukas Eliazer dalam wawancara dengan peneliti di Kantor Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta (31 Januari 2018).

Hambatan selanjutnya terletak pada tahap pemberdayaan dan pengawasan dinamika ormas di Jakarta yang luar biasa perkembangannya; mulai dari jumlah ormas, latar belakang, kepentingan, serta perbedaan karakter sehingga tidak semua ormas dapat dikoordinasikan mudah begitu saja. Terkait koordinasi,

maka persoalan anggaran menjadi penting sebagai variabel operasional pemberdayaan dan peningkatan peran ormas. Penurunan anggaran besar-besaran sejak tahun 2015 (era pergantian gubernur DKI Jakarta) karena diindikasikan rawan menjadi sarang korupsi, menurut Eliazer, sedikit banyak turut berpengaruh pada anggaran penguatan kapasitas ormas. Misalnya, pada pemangkasan biaya transportasi ormas untuk mengikuti kegiatan pelatihan. “Ini *kan* berpengaruh pada minat ormas tersebut dalam mengikuti kegiatan. Semangatnya juga bisa jadi berkurang *yah* sejak uang transport dipangkas. Memang *sih*, diindikasikan takutnya jadi bahan bancakan...”

Pada tahap pengawasan, Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta mengalami kesulitan untuk memantau total pergerakan ormas yang sangat banyak jumlahnya di Jakarta. Terlebih kasus-kasus konflik yang melibatkan antar ormas di lapangan, secara umum merupakan kasus level *grass root* yang persoalannya bukan tentang perbedaan idealisme/fondasi ormas itu sendiri, melainkan persoalan sehari-hari yang kemudian dibawa atas nama atribut ormas. Kemudian secara spesifik menyoal konflik antar ormas, hambatan lain disampaikan Sony Triwibawa selaku Kepala Subbidang Pemantauan dan Penanganan Konflik Sosial. Khususnya pada penanganan ketika konflik antar ormas sudah pecah, adalah kesulitan klasifikasi apakah konflik tersebut benar antar anggota ormas, atau sebenarnya penyalahgunaan atribut ormas saja, atau hanya masalah pribadi yang dibawa dengan identitas ormas sehingga kategorinya konflik warga biasa/pemuda (Sony, 2018). Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta mencatat tren kenaikan angka konflik tawuran secara umum di Jakarta (yang di dalamnya juga melibatkan embel-embel atribut ormas walaupun tidak semuanya), yakni pada tahun 2014 sebanyak 19 kejadian, tahun 2015 sebanyak 36 kejadian, tahun 2016 sebanyak 45 kejadian, dan tahun 2017 sebanyak 50 kejadian. Dikatakan Sony

Triwibawa, “Saya pun merasa *kecolongan, maaf-maaf* nih ya ini kan ketika ada tawuran konflik begitu trennya naik, pasti jadi sorotan buat kita juga (Bakesbangpol), *kok* bisa, *nah* makanya itu saya lakukan terus pemantauan.”

Lebih luas secara struktural, menurut Sony, faktor kesenjangan yang sangat tinggi di Jakarta menjadi penyebab konflik sosial di Jakarta, salah satunya termasuk konflik antar ormas. Selain itu, DKI Jakarta sebagai ibukota negara yang merupakan ‘barometer dan refleksi’ bangsa Indonesia yang multi etnik, multi agama, multi ras, dan multi golongan dan kepentingan menjadikannya sangat rentan terhadap konflik. Beberapa kondisi objektif yang dihadapi masyarakat berpotensi menjadi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang dapat berujung pada konflik. Jakarta sebagai ibukota negara merupakan pusat pertarungan politik dan perebutan kekuasaan dalam pemerintahan. Keadaan ini membuat Jakarta rentan terhadap segala dampak yang timbul dari kehidupan politik di Indonesia. Selain itu, masyarakat Jakarta merupakan masyarakat majemuk (*pluralistic society*) yang terdiri dari beraneka ragam suku bangsa, ras, agama dan golongan. Keadaan ini membuat interaksi sosial di Jakarta menjadi sangat kompleks dan dinamis. Yang paling mendasar yakni secara struktural dan kultural, krisis multi dimensi yang berkepanjangan membuat kehidupan masyarakat menjadi sangat berat. Keadaan ini pada akhirnya nyaris menghilangkan kepercayaan (*trust*) masyarakat terhadap rasa pengharapan masa depan yang lebih baik (Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta, 2015).

Menanggapi fenomena konflik antar ormas yang acapkali terjadi di Jakarta, lalu berujung pada tindak kriminal yang meresahkan warga, peneliti kemudian mewawancarai pakar kriminologi Universitas Indonesia Dr. Iqrak Sulhin, S.Sos., M.Si. Ketika ditemui di Depok (1 Februari 2018), Iqrak menyatakan

bahwa kesulitan dalam penanganan konflik tersebut adalah lantaran konflik antar ormas terdiri di 2 level: level atas dan level bawah. Level atas yakni permainan politik identitas, namun menurut Iqrak, yang lebih empiris dan riil menyebabkan konflik-konflik antar ormas terjadi pada level bawah, yakni adanya perebutan *resources* (sumber daya). Iqrak menjelaskan:

“Kehadiran ormas-ormas ini bermain di sektor-sektor informal. Saya cenderung melihat konflik yang melibatkan ormas bukan karena identitas, bukan karena yang satu nasionalis vs religius misalnya. Tetapi memang kelas-kelas terjadi karena perebutan *resources*, itu bahasa konseptualnya ya. Selain identitas ternaungi, mereka pun terfasilitasi dari sisi ekonomi, ada sektor-sektor informal. Pergesekan politik identitas juga semakin kuat. Mereka yg bergabung di ormas, secara sosiologis mereka punya kesamaan sebagai orang Jakarta, kemudian misalnya status ekonomi dan pekerjaan sulit. Kesamaan-kesamaan inilah yang disebut *common ground* dan itu yang bisa diintervensi... Kalau pemerintah daerah bisa masuk ke *community developingnya*. Salah satu yang menjadi perhatian adalah Kesbangpol. Semestinya ketika bicara peran negara, ini *kan* bukan hanya sekedar menyampaikan larangan bahwa *you nggak* boleh ini, *nggak* boleh itu. Tidak hanya sekedar sosialisasi... Yang perlu dilakukan adalah bermain di *grassroot*, sebab yang riil adalah di *grassroot*, yang tampak adalah di *grassroot*, yang berkelahi juga di *grassroot*. Variabel-variabel yg menyebabkan mereka bersentuhan dengan kriminal ada di level *grassroot*. Jakarta adalah *golden triangle*, nah saya rasa aspek demografi penting diperhatikan. *Heavy crime, light crime spreading* di mana tidak sebatas teritorial saja, tetapi soal demografi. Teritorial ormas itu bukan sesuatu yang *insist* maupun *exist*. Yang harus disasar adalah mengapa mereka mau bergabung dengan ormas? Cobalah lihat secara demografis. Berapa banyak dari mereka yang bergabung di ormas, mereka merasa terfasilitasi dari bukan seseorang menjadi seseorang.”

4.3 Pembahasan

4.3.1 Implementasi Tugas dan Fungsi Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta dalam Manajemen Konflik Antar Ormas di Jakarta (2014-2017)

Secara esensial, perspektif penelitian ini memandang Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta memiliki keunggulan sebagai lembaga holistik manajemen dan resolusi konflik demi terbentuknya kesatuan di Jakarta. Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta merupakan unsur lembaga pemerintah daerah yang strategis, utamanya mengingat lokasi Jakarta sebagai ibukota yang merupakan *center of gravity* NKRI (Aldin Hadi, 2018). Sehingga dengan demikian, berbagai isu keamanan Jakarta dapat membawa imbas ke dalam lingkaran keamanan nasional, salah satunya yakni isu konflik antar ormas yang memang menjadi urusan Bakesbangpol. Bakesbangpol tidak berurusan langsung dengan hal-hal militeristik, melainkan lembaga ini bersinggungan langsung dengan persoalan sipil dan konflik sosial di masyarakat. Pasca reformasi, supremasi sipil mengemuka dan problem sosial hadir dalam nuansa *civil society*. Sejak era tersebutlah ormas di Jakarta menjamur dalam berbagai bentuk. Implikasinya, dalam pengelolaan yang belum optimal, seteru kelompok dan stereotipe golongan antar ormas nyatanya telah menjadi fenomena keseharian di Jakarta, bahkan menjadi kebiasaan dan pelabelan yang juga diamini oleh ormas bersangkutan. Sehingga demikian, perlu dilakukan analisis terhadap implementasi tugas pokok dan fungsi Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta dalam manajemen konflik antar ormas di Jakarta.

Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta adalah lembaga pemerintah daerah dengan peran strategis dalam pengelolaan, pembinaan, dan pemberdayaan ormas. Khususnya pada tataran pengelolaan dengan sasaran ormas mampu kuat dan kooperatif,

sehingga membawa implikasi damai dan potensi konflik antar ormas dapat diminimalisasi. Adapun giat teknis pengelolaan ormas mengacu pada tugas pokok Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta yang termaktub dalam Pasal 3 Ayat 1: “merumuskan kebijakan teknis, merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, dan melaksanakan tugas-tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik meliputi pemantapan integrasi bangsa, pengembangan demokrasi dan hak asasi manusia, pengembangan hubungan kelembagaan, dan kewaspadaan.”

Kapasitas lembaga dalam hal ini Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta, dapat terlihat dari implementasi tugas pokok dan fungsi. Implementasi adalah proses yang menghantarkan suatu tujuan/hasil sesuai dengan cara-cara yang telah ditetapkan (Webster, 1971). Sepanjang tahun 2014-2017, Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan giat teknis tata kelola keberadaan ormas dan penanganan konflik antar ormas di Jakarta. Mengacu pada tiga unsur penting proses implementasi (Syukur dalam Surmayadi, 2005) yakni adanya program, adanya target, dan adanya unsur pelaksana, ketiga hal ini telah dilakukan Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta dalam mengelola ormas dan menangani konflik antar ormas di Jakarta. Program peningkatan peran ormas, forum silaturahmi Forkopimda dengan ormas, serta *workshop* Pancasila menjadi program rutin Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta. Adapun penekanan target program yakni pada ormas-ormas yang terdaftar di SKT dan aktif dalam forum silaturahmi Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta. Pada aspek unsur pelaksana, Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta mengelola konflik antar ormas sebagai koordinator strategis, dan membagi-bagi peran kepada aparat keamanan berwenang. Seperti dalam patroli pemantauan keamanan di titik-titik yang rawan tawuran ormas, adalah menjadi porsi pelaksanaan pihak Satpol PP dan Kepolisian. Sebagai induk dari seluruh Kesbangpol lima kotamadya di DKI Jakarta,

Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta menjalankan fungsinya untuk memimpin, mengarahkan, dan membina program serta aksi strategis pemberdayaan ormas pada Kesbangpol tingkat kota.

Pada dasarnya kapasitas Bakesbangpol sebagai lembaga pencegah konflik sosial, sesuai dengan Pasal 1 Ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Pencegahan konflik sosial didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini. Pencegahan konflik menjadi aspek yang paling krusial karena dapat mengurangi kemungkinan pecahnya sebuah konflik yang akan berujung pada korban jiwa dan kerugian material. Berdasarkan definisi World Bank (2011), kapasitas lembaga adalah kemampuan lembaga menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien. Selanjutnya dalam menganalisis kapasitas, teori organisasi digunakan sebagai *conceptual framework* penelitian ini. Menurut Davis (Lubis, 2009), setiap organisasi memiliki pola struktur tertentu dengan tujuan, tugas dan fungsi tertentu. Dengan mengkontekstualisasikan *General System Theory* dari Bertalanffy (1972) yang membahas beberapa aspek dalam telaah organisasi, penelitian ini melihat relasi dari aspek-aspek tersebut.

Aspek individu; peneliti arahkan pada sikap, motivasi kerja, dan interaksi individu-individu *primary stakeholder* dalam pengelolaan konflik antar ormas. *Primary stakeholder* tersebut difokuskan pada subjek penelitian organisasi Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta, yaitu Subbidang Ormas dan Subbidang Pemantauan dan Penanganan Konflik Sosial. Pada tataran individu, peneliti mengolah informasi tentang latar belakang dan kompetensi pegawai di Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta, khususnya di kedua subbidang tersebut. Adapun pada latar belakang pendidikan formal, baik Kepala Subbidang Ormas

maupun Subbidang Pemantauan dan Penanganan Konflik Sosial adalah lulusan S2 manajemen, dengan kekhususan *soft skill* komunikasi intrapersonal, manajerial, analisis sosial, dan mediasi. Sebagai pejabat Bakesbangpol provinsi, keduanya mengutamakan program kerja yang menjunjung nilai-nilai Pancasila dalam setiap rancangan giat teknisnya, dan kemudian nilai tersebut ditransfer kepada staf yang membantu pekerjaannya.

Aspek formal; agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik, suatu organisasi harus disusun berdasarkan prinsip, peraturan dan alur prosedur tertentu (Bertalanffy, 1972). Pada aspek ini, peneliti menelusuri regulasi Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta dalam pemberdayaan dan penguatan ormas di Jakarta. Regulasi tersebut berlandaskan pada peraturan pemerintah tentang ormas, yakni UU 16 Tahun 2017 yang menekankan kepatuhan ormas pada Pancasila dan UUD 1945, dan Permendagri Nomor 56-58 Tahun 2017 tentang ormas. Standar operasional prosedur tentang keormasan ini oleh Bakesbangpol dinamakan alur Surat Keterangan Terdaftar (SKT), sehingga ormas yang telah terdaftar dalam SKT di tingkat provinsi adalah ormas legal yang berhak mendapat pemberdayaan dan penguatan baik moriil maupun materiil, seperti misalnya sokongan dana dan hibah kegiatan ormas.

Kemudian pada segi penanganan konflik antar ormas, regulasi diatur berdasarkan UU 7 Tahun 2012 dan Pergub DKI 258 Tahun 2016. Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta menerapkan sistem regulasi berbasis koordinasi, dalam artian Bakesbangpol Provinsi ini wewenangnya sebatas membina dan mengkoordinasi elemen terkait dalam manajemen konflik antar ormas, khususnya pada level preventif. Ketika konflik berusaha diurai lewat mediasi, Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta membagi-bagi tugasnya pada pimpinan daerah dan biasanya maksimal pada Kesbangpol kota.

Ketika proses mediasi di tingkat kota menemui jalan buntu, barulah Subbid Pemantauan dan Penanganan Konflik Sosial bertindak sebagai mediator di skala propinsi. Ketika konflik antar ormas telah pecah, maka Bakesbangpol mendelegasikan wewenang penanganan sepenuhnya pada aparat kepolisian setempat.

Pada aspek informal, peneliti mendalami inisiatif dan sejauh mana forum silaturahmi Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta dalam mengelola keberadaan ormas di Jakarta. Forum silaturahmi tersebut sepanjang kurun waktu 2014-2017 secara umum berjalan, bahkan tidak hanya dengan ormas tetapi juga unsur masyarakat lainnya. Namun dengan beberapa ormas yang tidak banyak berinteraksi maka silaturahmi pun menjadi tertutup. Pada aspek status dan peran, peneliti menggali kewenangan pada struktur organisasi Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta, mulai dari satuan teratas hingga satuan terbawah, khususnya yang berkaitan langsung dengan pembinaan dan pengelolaan ormas. Kewenangan ini telah berjalan dengan struktur formal dan garis komando, ditambah dengan adanya dua Subbid khusus pada Bakesbangpol tingkat provinsi yaitu Subbid Ormas dan Subbid Pemantauan dan Penanganan Konflik Sosial, inilah yang menjadi kekuatan Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta dibandingkan Kesbangpol lainnya. Lalu pada aspek lingkungan fisik, peneliti mengobservasi situasi kantor Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta meliputi sarana dan prasarana, teknologi yang digunakan, dan seterusnya. Pada pengelolaan ormas misalnya, menurut Eliazer (2018), Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta telah membangun sistem SKT *online* dan mekanisme *cross check* dengan Ditjen Polpum Kemendagri. Secara umum, teknologi yang digunakan cukup handal, ditambah dengan fasilitas kantor Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta yang nyaman dan mumpuni.

Menyangkut hubungan antar bagian, penelitian ini menganalisis koordinasi antar bagian bidang; baik internal Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta, maupun eksternal dengan instansi lain. Pada tahun 2014-2017, dalam mengelola ormas dan menangani konflik antar ormas, Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta melakukan koordinasi internal melalui giat teknis program kerja yang diadakan bersamaan oleh berbagai bidang. Adapun koordinasi eksternal diadakan Bakesbangpol dengan segenap SKPD, forum pimpinan daerah, dan ormas. Meski demikian, tidak lantas semua ormas dapat dirangkul begitu saja.

Khusus mengenai pengelolaan ormas, standar kinerja yang ditetapkan Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta mengerucut pada tiga poin, yakni terdaptarnya ormas di SKT, ormas aktif menyelenggarakan kegiatan yang mendukung pembangunan, serta ormas mampu diberdayakan melalui sejumlah penguatan. Sobandi (2006) menekankan pentingnya *benefit* dan *impact* dari analisis kinerja organisasi. Merujuk pada hal tersebut, dapat dilihat bahwa Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta menggarisbawahi ketaatan ormas pada regulasi dan keaktifan ormas sebagai *benefit*. Sedangkan pada poin *impact*, Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta masih *concern* pada asas ketaatan regulasi; upaya ormas-ormas agar dapat tertib terdaftar dan beriringan dalam pembangunan daerah. Sedangkan konflik sosial antar ormas yang sebetulnya menjadi *impact* dari keberadaan ormas, belum menjadi *starting point* identifikasi dan perancangan giat teknis ormas. Sehingga ketika ormas tersebut berkonflik, maka tanggung jawab sepenuhnya dikembalikan pada ormas yang bersangkutan, sebab paradigma Bakesbangpol bercokol pada sosialisasi dan edukasi khususnya pada tingkat elit ormas, dan belum mengarah pada intervensi sosial pemerintah daerah terhadap *common ground* ormas yang sering berkonflik.

Provinsi DKI Jakarta adalah kawasan sentral Indonesia yang sangat plural. Realitas yang plural tidak lepas dari ragam kepentingan yang dilandasi kondisi sosial historis sebuah masyarakat. Berangkat dari kondisi tersebut, menurut Soeharto (2013), pemerintah pada masyarakat yang plural harus terus berusaha mengelola konflik agar tidak membawa kerugian yang lebih besar. Konflik sebagai produk laten pada masyarakat yang plural memang harus diantisipasi melalui kemampuan pemerintah untuk jeli mengelola tatanan masyarakat agar tidak mudah terpecah. Beranjak dari penekanan ini, maka kekhasan tipologi, sumber, dan dinamika konflik menjadi hal-hal mendasar yang penting diperhatikan oleh pemerintah sebagai aktor besar dalam manajemen konflik. Dalam konteks manajemen konflik antar ormas di Jakarta, Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta secara umum telah memiliki sistem manajemen konflik berbasis koordinasi, termasuk dalam mengidentifikasi tipologi konflik. Meski demikian, perlu ditingkatkan lagi ketajaman identifikasi tersebut sebab pola-pola konflik, khususnya antar ormas, semakin berkembang dan konflik antar ormas tersebut tidak lagi dapat dikatakan sebagai konflik warga biasa. Sebab dalam kajian kriminologi, konflik kelompok (termasuk salah satunya antar ormas) jika dibiarkan terus-menerus dapat menjadi *organized crime* yang berbahaya (Iqraq Sulhin, 2018). Konflik antar ormas menjadi berbeda dengan konflik/bentrok kelompok lain, sebab ormas memiliki tingkat solidaritas yang diafirmasi melalui *common ideas* seperti kesukuan, ideologi, agama, dan seterusnya. Pada tingkat akar rumput, *common ground* tersebut bergeser ke tataran yang lebih empiris dan pada dasarnya sama, yakni ketidakberdayaan masyarakat terutama di segi ekonomi, yang kemudian terekspresikan melalui aksi-aksi konflik membawa nama ormas. Menurut Ross (1993), manajemen konflik adalah langkah-langkah yang diambil dalam rangka mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu. Manajemen konflik meliputi

beberapa langkah yaitu: penerimaan terhadap keberadaan konflik (dihindari atau ditekan/didiamkan), klarifikasi karakteristik dan struktur konflik, evaluasi konflik (jika bermanfaat maka dilanjutkan dengan proses selanjutnya), menentukan aksi yang dipersyaratkan untuk mengelola konflik, serta menentukan peran perencana sebagai partisipan atau pihak ketiga dalam mengelola konflik. Langkah-langkah tersebut harus dilihat oleh Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta ke depan, sebab sepanjang tahun 2014-2017 terdapat suatu stagnansi paradigma lembaga Bakesbangpol, utamanya partisipan dalam mengelola konflik. Pola-pola pencegahan konflik dengan model sosialisasi dan edukasi yang selama ini dijalankan Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta, nyatanya disayangkan oleh sejumlah informan dalam penelitian ini, sebab pola tersebut sulit menembus fragmentasi perpecahan ormas di level akar rumput.

Menurut Fisher (2000), manajemen konflik adalah sebuah proses dengan melihat anatomi dan sebab-sebab mengapa konflik itu terjadi, dan melakukan berbagai tindakan berdasarkan analisis tersebut guna mendapatkan solusi agar konflik dapat terselesaikan. Konflik seringkali pecah akibat informasi yang bias, sehingga pihak-pihak yang berkonflik perlu diajak berbicara satu sama lain guna memahami kebutuhan dan kepentingan masing-masing, agar konflik dapat terselesaikan. Di sinilah peran strategis Bakesbangpol dalam mendudukkan posisi antar ormas, dan sejauh ini (2014-2017) Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta telah melakukan kegiatan tersebut melalui forum silaturahmi dan komunikasi. Kegiatan tersebut hanya perlu dioptimalkan dan diperluas agar semua ormas di Jakarta merasakan rekognisi yang sama, sehingga sentimen antar ormas dapat diredam bahkan dicegah agar tidak tereskalasi sebagai konflik. Sebab berdasarkan hasil penelitian ini, tidak lantas semua ormas di Jakarta berelasi aktif dengan Bakesbangpol. Jeong (2010) menjelaskan konflik sebagai proses yang tidak terhindarkan. Konflik hadir lantaran kepentingan yang

inkompatibel, serta kolektivitas berlawanan yang diekspresikan dalam sejumlah bentuk. Faktor identitas seringkali menjadi justifikasi atas gesekan sosial. Stereotipe Kami vs Mereka digunakan sebagai bahan agitasi politis untuk memecah konflik. Oleh karena itu, kapasitas aktor berwenang dalam mengelola konflik sangatlah penting diperhatikan dalam manajemen konflik. Pentingnya kapasitas aktor berwenang menurut Jeong (2010), dalam konteks penelitian ini yakni Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta, idealnya mampu melakukan lima tahapan manajemen konflik, yakni 1) identifikasi inkompatibilitas antar ormas, 2) pemahaman pola konflik antar ormas, 3) negosiasi perbedaan nilai antara ormas, 4) mengurangi persepsi permusuhan antar ormas, dan 5) pembentukan hubungan baru antar ormas yang sering berkonflik. Jeong menyebut rangkaian rekonsiliasi (*peace talks*) perlu dilakukan secara kontinu oleh aktor manajemen konflik yang berwenang. Berdasarkan penelitian di lapangan, sepanjang tahun 2014-2017 fokus pembinaan dan pengelolaan ormas yang dilakukan oleh Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta berhenti di tahap dua, sedangkan tiga tahap berikutnya belum sepenuhnya optimal. Sehingga simbol-simbol eksklusif yang melekat pada pengalaman sejarah antar ormas, ke depan masih menjadi *trigger* yang harus diantisipasi.

4.3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Tugas dan Fungsi Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta dalam Manajemen Konflik Antar Ormas di Jakarta (2014-2017)

Faktor pendukung implementasi tugas pokok dan fungsi Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta, utamanya terletak pada koordinasi yang selama ini telah berjalan baik dengan SKPD Forkopimda dan Kominda Jakarta. Sebab tugas pokok Bakesbangpol adalah sebagai koordinator yang tidak dapat bekerja

sendirian dalam membina dan memantau pergerakan ormas. Oleh karenanya, koordinasi dengan Forkopimda dan Kominda yang sepanjang kurun waktu tahun 2014-2017 telah berjalan, adalah faktor pendukung dari implementasi tersebut. Menurut Awaluddin Djamin dalam Hasibuan (2011: 86), koordinasi diartikan sebagai suatu usaha kerja sama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi. Dengan demikian koordinasi dapat diartikan sebagai suatu usaha yang mampu menyelaraskan pelaksanaan tugas maupun kegiatan dalam suatu organisasi. Koordinasi dan hubungan kerja adalah dua pengertian yang saling berhubungan karena koordinasi hanya dapat tercapai sebaik-baiknya dengan melakukan hubungan kerja yang efektif. Hubungan kerja adalah bentuk administrasi yang membantu tercapainya koordinasi. Oleh karena itulah, hasil akhir atas komunikasi hubungan kerja adalah tercapainya koordinasi dengan cara yang berhasil guna dan berdaya guna (efektif dan efisien). Dalam hal ini, koordinasi Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta dengan sejumlah instansi terkait mulai dari pimpinan daerah hingga aparat keamanan menjadi faktor pendukung dalam tujuan pembinaan, pemberdayaan, dan pemantauan ormas di Jakarta. Faktor pendukung lain, yaitu landasan regulasi ormas yang kini semakin diperketat melalui pengesahan UU 16 Tahun 2017 tentang ormas. Regulasi ini merupakan refleksi atas undang-undang sebelumnya yang dianggap kurang tegas, dan ketidaktegasan tersebut menyuburkan perkembangan bibit-bibit ormas radikal yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Adapun secara khusus faktor pendukung lain yang menjadi kekhasan Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta adalah posisinya sebagai lembaga unsur pemerintah di daerah sentral Indonesia, dengan konsiderasi yang tinggi dan upah kesejahteraan pegawai

yang juga tinggi. Ini memberi dampak positif yang signifikan dalam motivasi kerja para pegawai di Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta.

Sedangkan faktor penghambat cenderung banyak ditemui dalam implementasi tugas pokok dan fungsi Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta dalam manajemen konflik antar ormas di Jakarta (2014-2017). Utamanya, yakni tipologi kota Jakarta yang sangat dinamis sehingga perkembangan ormasnya juga dinamis, sistem sosial yang beragam secara demografis, dan memiliki ciri khas sebagai sorotan pusat pemerintahan. Sehingga tantangan yang dihadapi Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta pun menjadi lebih krusial. Lebih lanjut, faktor ketidakberdayaan ekonomi yang masih tinggi di Jakarta mengakibatkan potensi-potensi konflik termasuk konflik antar ormas mudah pecah di level *grass root*. Berdasarkan wawancara penelitian ini dengan Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta dan sejumlah pihak terkait, mulai dari ormas, TNI, Polri, Satpol PP, hingga akademisi, pendapat semuanya mengacu pada satu hal yakni kesulitan menangani dan meningkatkan kapasitas antar ormas di level *grass root*. Sehingga, program binaan dan pemberdayaan ormas yang dilakukan Bakesbangpol terbatas pada tataran petinggi ormas saja, dan belum menyentuh tingkat akar rumput ormas yang sering bergesekan sehari-hari di lapangan. Di mana petinggi ormas tersebut pun mengaku kesulitan untuk mengawasi anggota mereka sepenuhnya. Ketidacukupan kekuatan petinggi ormas dalam memantau dan memastikan anggota ormas pada level akar rumput, belum menjadi cakupan kerja Bakesbangpol. Program-program Bakesbangpol pada tahun 2014-2017 dalam pemberdayaan ormas masih dalam *sense* yang sama, yakni penguatan hubungan elit lembaga antar ormas. Namun intervensi terhadap *common ground* ormas di tataran akar rumput yang sering berkelahi, masih perlu ditingkatkan melalui rancangan dan kapasitas kerja Bakesbangpol. Sehingga, ketika sekalipun Bakesbangpol merangkul sejumlah ormas, yang disebut

ormas tersebut hanya representasi petinggi ormas yang tidak mewakili kondisi empiris pelaku konflik ormas yakni level *grass root*.

Lan (2014) mengemukakan tiga hal yang harus dibangun dalam upaya pencegahan konflik, yakni pengembangan mekanisme institusional, pembangunan mekanisme peringatan dini, dan peningkatan kapasitas masyarakat yang rawan konflik. Dua hal pertama yakni pengembangan mekanisme institusional dan mekanisme peringatan dini sebenarnya telah dibangun oleh Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta, melalui serangkaian regulasi dan alur kegiatan dua subbidang yang beririsan dengan manajemen konflik antar ormas, yaitu Subbidang Ormas dan Subbidang Pemantauan dan Penanganan Konflik Sosial. Namun hal terakhir yang disebutkan Lan yakni peningkatan kapasitas masyarakat rawan konflik, terhambat lantaran kompleksitas permasalahan masyarakat Jakarta, utamanya motif ekonomi ditambah *trigger* sentimen pribadi yang mudah keluar, kemudian terekspresikan dalam atribut keormasan, sehingga muncullah konflik antar ormas. Padahal, dinamika ormas di Jakarta yang sering berkonflik sebenarnya menghadapi esensi persoalan yang sama, yakni lemahnya situasi ekonomi sehingga menimbulkan ketidakberdayaan masyarakat. Konflik yang hadir sehari-hari bukanlah kontestasi ideologis, melainkan konflik urusan perut. Di sisi lain, ormas hadir mengisi ruang tersebut baik dari sektor informal ekonomi maupun sosial psikologis.

Faktor penghambat lain, yakni tidak semua ormas serta-merta mudah dikoordinasikan dan dibina. Sebab sepanjang 2014-2017 pun Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta mengalami kesulitan dalam menyatukan dan mendudukan seluruh ormas tersebut, untuk kemudian berdialog dan merefleksikan perbedaan persepsi di lapangan yang sering berujung pada konflik sehari-hari. Ketika penelitian ini berusaha mengonfirmasi pola komunikasi dan

koordinasi Bakesbangpol dengan ormas pun terjadi semacam saling lempar bola, baik antara pihak pemerintah maupun ormas yang bersangkutan. Kemudian hambatan pada internal, yakni kapasitas Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta yang terbatas dengan beban kerja yang krusial di kota sentral Indonesia, termasuk dalam mengkoordinasi tugas, memantau, serta mencegah konflik antar ormas yang sedemikian dekat dengan keseharian masyarakat. Menurut Serdamayanti (2005: 336), pengembangan kapasitas kelembagaan merupakan bagian dari perubahan birokrasi yang penting dan menentukan, sehingga mengarah pada upaya mewujudkan kriteria pemerintahan yang baik. Sehingga nantinya, kapasitas kelembagaan merupakan faktor yang penting diperhatikan dalam perancangan teknis kerja Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta. Tidak hanya mengacu pada UU Analisa Jabatan secara kaku, tetapi juga dinamis dengan melihat lingstra Jakarta dan kompleksitas permasalahannya.

4.3.3 Skema Rekomendasi Manajemen Konflik Antar Ormas di Jakarta

Sepanjang tahun 2014-2017, Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta menjalankan fungsi pengelolaan ormas dengan mengacu pada tiga hal, yakni terdapatnya ormas di SKT, keaktifan ormas, dan pemberdayaan ormas melalui program-program sosialisasi, forum silaturahmi, *workshop* peningkatan peran, dan sejenisnya (Eliazer, 2018). Anggaran yang disediakan untuk program tersebut pun terbilang besar, mulai dari pembinaan ormas hingga pemantauan dan penanganan konflik ormas. Pada subbidang pemantauan dan penanganan konflik sosial misalnya, Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta telah mengembangkan sistem deteksi dini yang sesuai dengan konsep *Conflict Early Warning and Early Response System (CEWERS)*, dengan anggaran sistem yang

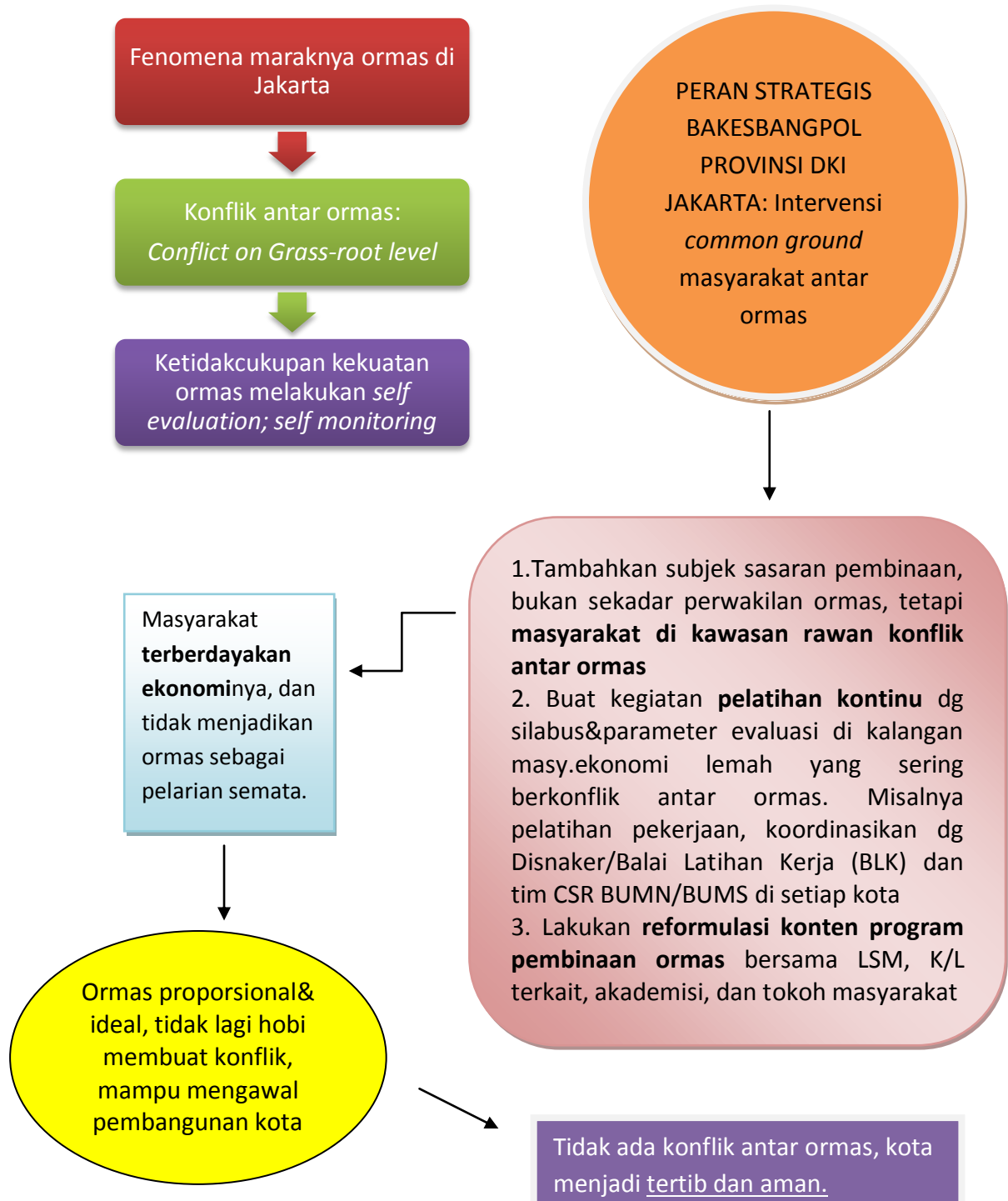
besar dan teknologi memadai. Sayangnya, program-program tersebut pada praktiknya belum optimal menysasar level bawah ormas yang sering berkonflik tersebut. Kapasitas Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta terbatas pada pola relasi pada ormas yang dapat dijangkau, tergolong elitis ormas, dan 'dekat' dengan Bakesbangpol. Sehingga justru oknum anggota ormas yang sering berkonflik tersebut terkesan luput dari pembinaan.

Dalam manajemen konflik antar ormas, dengan mengkontekstualisasikan teori Jeong (2010), bahwa perlu dilakukan identifikasi inkompatibilitas ormas yang sering bergesekan. Berdasarkan hasil penelitian ini, berdasarkan kurun waktu 2014-2017 inkompatibilitas ormas yang berkonflik di Jakarta pada dasarnya adalah sentimen pribadi dan persoalan ketidakberdayaan masyarakat, dan itulah yang seyogyanya menjadi *identified common ground*, yang juga semestinya menjadi pertimbangan Bakesbangpol. Namun pada rancangan kerja hingga giat teknis tata kelola ormas 2014-2017, Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta memposisikan dirinya sebagai pembina struktural. Dalam artian ketika konflik antar ormas terjadi, maka pembinaan dilakukan sesuai struktur yang ada. Pembinaan dan peningkatan sumber daya dilimpahkan kepada representasi pihak ormas yakni petinggi ormas. Sedangkan yang berkonflik sehari-hari adalah *level/ grass root* ormas.

Berdasarkan temuan dan analisis dalam penelitian ini, peneliti merekomendasikan tiga skema manajemen konflik pada tataran pencegahan konflik antar ormas di Jakarta. Skema pertama yakni intervensi pemerintah daerah, skema kedua yakni pembentukan Satuan Tugas Khusus (Satgasus) tingkat provinsi yang khusus memantau dan menangani ormas di Jakarta, dan skema ketiga yakni skema FGD (*Focus Group Discussion*) elitis antar ormas besar di Jakarta. Ketiga skema tersebut dapat

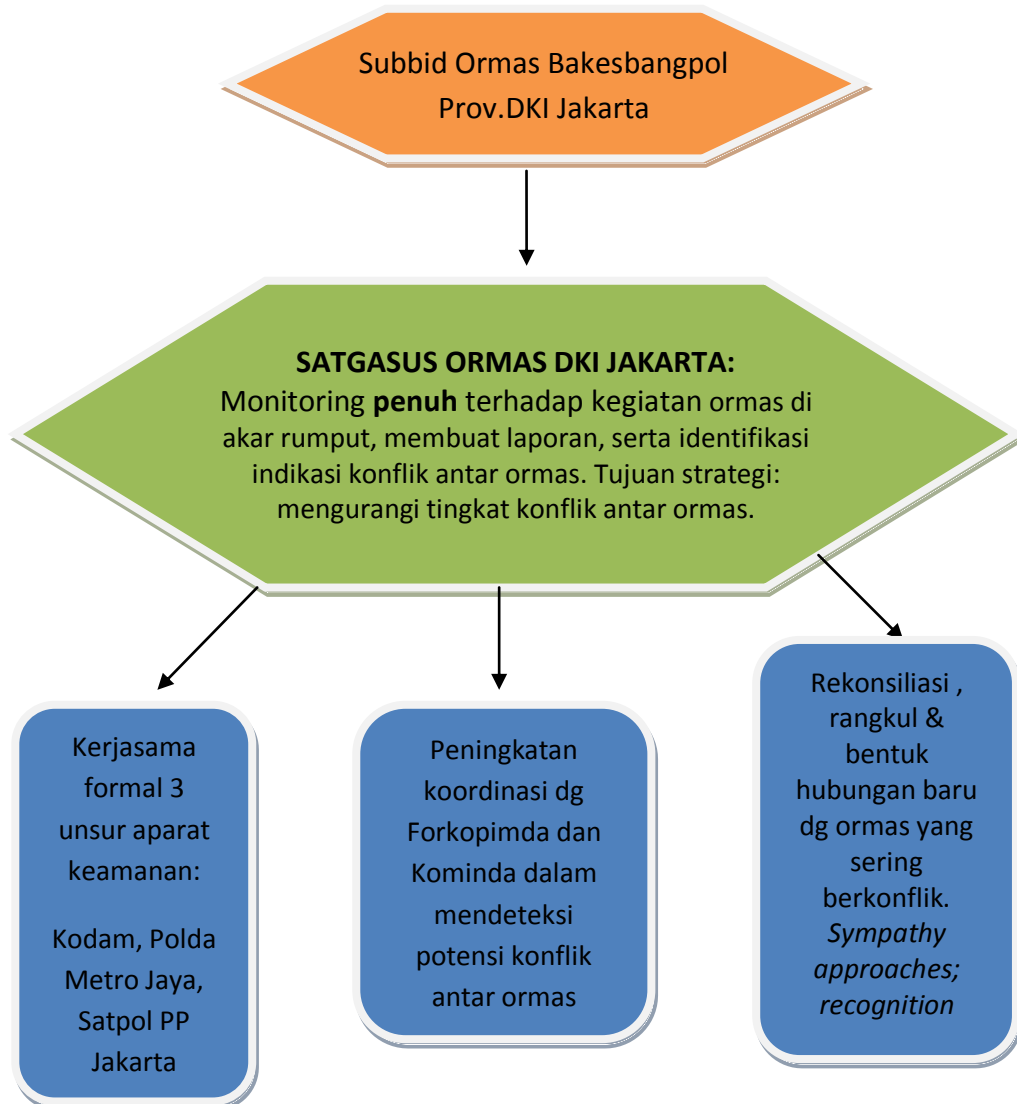
diimplementasikan oleh Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta, dan merupakan skema lanjutan dari pola koordinasi Bakesbangpol yang selama ini sudah berjalan khususnya dalam kurun waktu tahun 2014-2017.

Skema 1: Manajemen Konflik Antar Ormas Berbasis *Common Ground Intervention* oleh Pemerintah



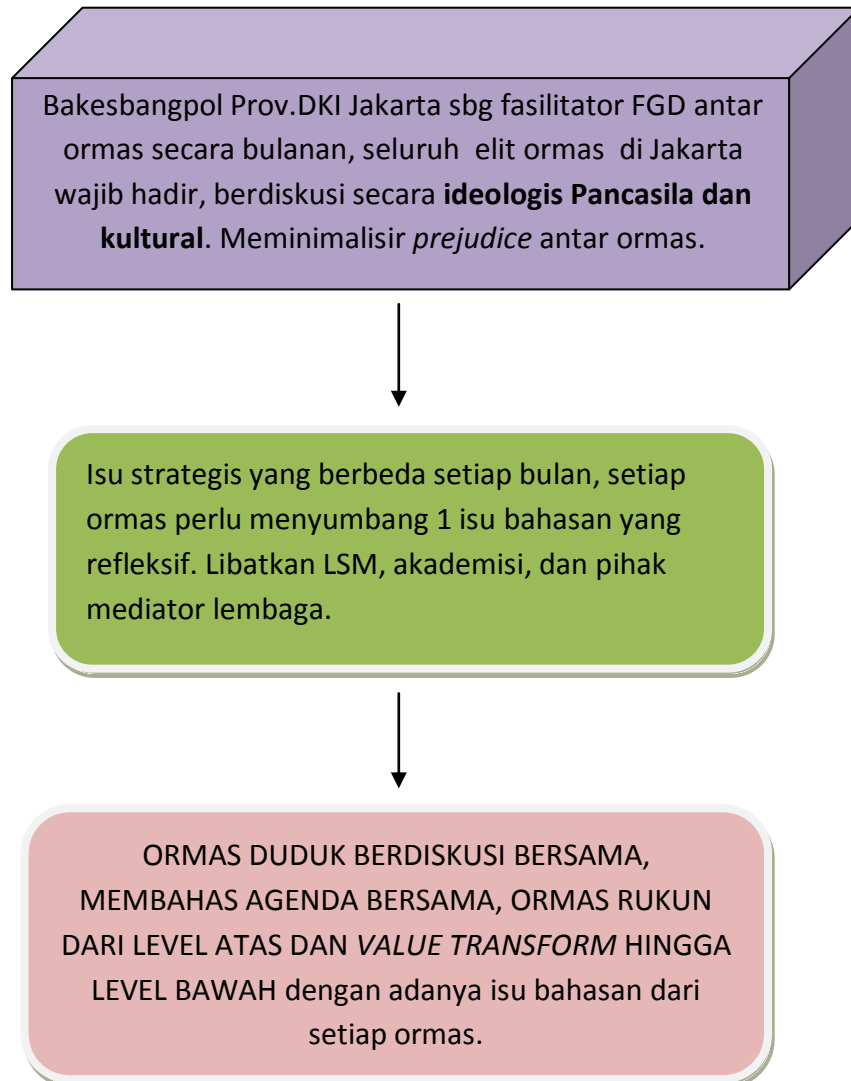
Skema 1 tersebut pada hakikatnya merupakan skema berbasis intervensi sosial. Intervensi sosial merupakan serangkaian kegiatan pemberdayaan bagi masyarakat yang tidak diuntungkan pada suatu wilayah tertentu, secara partisipatif dengan bertumpu pada kerangka metodologis psikologi sosial yang tepat guna. Intervensi tersebut bersifat kontinu, bertahap, dan berjangka panjang. Fokus intervensi tersebut adalah agar masyarakat mampu meningkatkan kapasitas dan kesadaran dirinya agar dapat mengakses sumber daya, sehingga kesejahteraan dan martabat dirinya dapat meningkat. Intervensi sosial adalah komponen kunci dari pencegahan konflik (Wessels, 1998). Pada kasus konflik antar ormas di Jakarta, akar struktural permasalahan adalah ketiadaan akses masyarakat yang sering berkonflik dalam kehidupan yang layak dan pekerjaan yang tepat. Sehingga, mereka merasa ormas menjadi pelarian sektor informal, di samping realitas bahwa ormas yang diikuti adalah bendera naungan atas kesamaan golongan tertentu. Di situlah letak strategis idealnya pemerintah daerah dapat masuk mengintervensi *common ground* melalui pelatihan dan pembinaan, yang bukan hanya berisi konten sosialisasi ormas tetapi lebih kepada pelatihan pemberdayaan kemandirian ekonomi sehingga aksi-aksi konflik antar ormas dapat diminimalisir. Sebab program sosialisasi tersebut tidak sepenuhnya mampu menjangkau seluruh kalangan anggota ormas. Nantinya, masyarakat yang sudah mandiri secara ekonomi dan terberdayakan tidak lagi disibukkan dengan gesekan ormas, tetapi mampu bertransformasi sebagai pengawal pemerintah dan berkontribusi dalam pembangunan kota.

Skema 2: Pembentukan Satgasus Pemantauan Ormas



Skema 2 tersebut merupakan skema respon terhadap situasi konflik antar ormas yang masih sering terjadi di Jakarta. Menanggapi pola penanganan yang dikoordinasikan Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2014-2017, perlu dibentuk suatu Satgasus yang bukan hanya sekadar *concern* terhadap ketaatan ormas terhadap regulasi pemerintah, atau mengadakan giat pemberdayaan ormas secara umum. Tetapi bertindak sebagai satuan khusus yang merekonsiliasi, merangkul, serta membentuk hubungan baru antar ormas yang sering berkonflik. Adapun satgasus ini dapat berada di bawah komando Subbid Ormas Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta.

Skema 3: *Focus Group Discussion* (FGD) Petinggi Ormas



Skema 3 tersebut merupakan tindak lanjut dari forum silaturahmi yang selama ini sudah diadakan Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta dengan ormas dan Forkopimda. Namun demikian, berdasarkan hasil di lapangan bahwa forum tersebut harus lebih ideologis, lebih rutin, sekaligus juga harus lebih teknis pada pembicaraan *common issues* dari pihak ormas-ormas yang sering berkonflik. Bukan sekadar forum sosialisasi, tetapi menjadi forum diskusi setara untuk semua ormas, melalui representasi elit ormas. Nantinya agenda bersama tersebut diharapkan mampu ditransformasikan kepada level bawah anggota ormas.